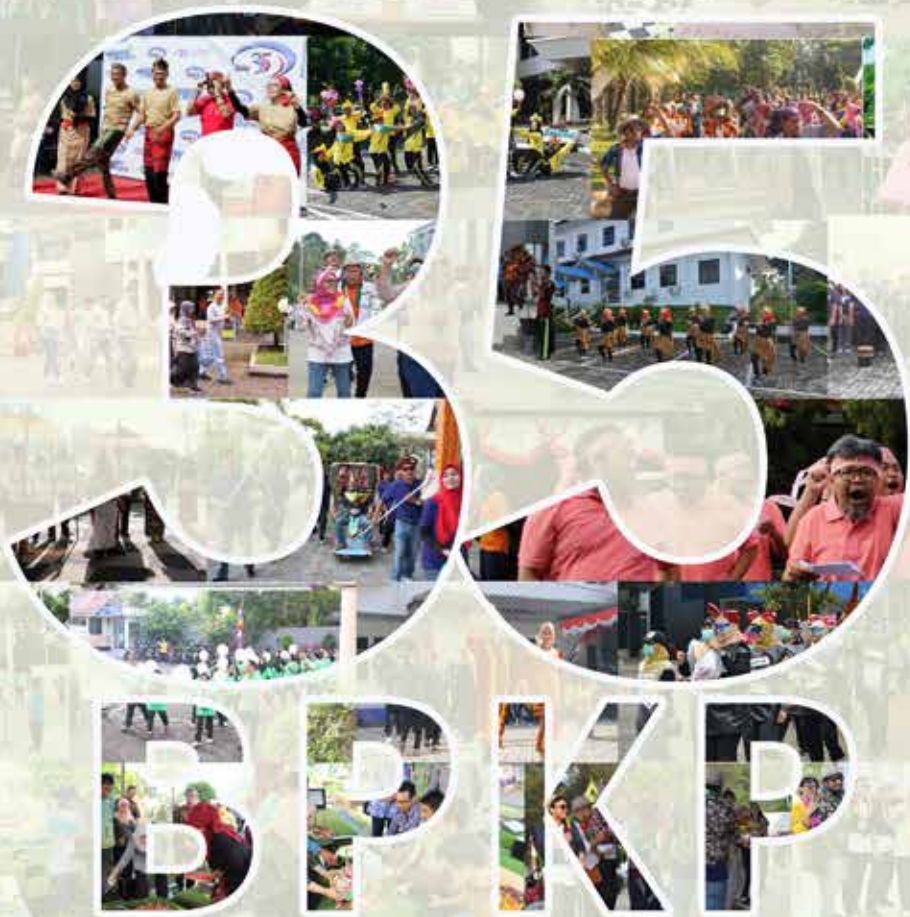


WARTA PENGAWASAN

NOMOR 2 TAHUN 2018
ISSN: 0854-0519 - www.bpkp.go.id

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**Inovasi Pengawasan
Wujudkan *Trusted Advisor***

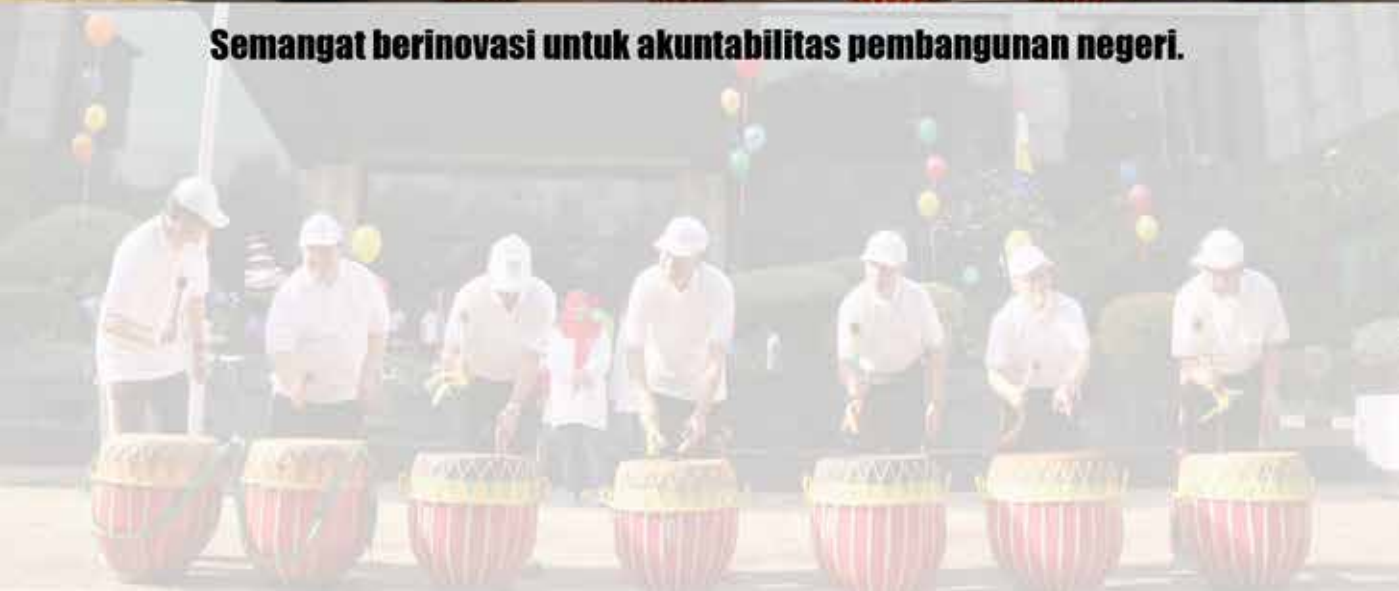
Warta Pengawasan

mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun ke-35 BPKP



Semangat berinovasi untuk akuntabilitas pembangunan negeri.



DIRGAHAYU BPKP

Bagi sebagian orang, ulang tahun hanyalah peristiwa tahunan yang berlalu begitu saja. Namun, tidak bagi kami. Warta Pengawasan edisi kedua kali ini terbit tepat tanggal 30 Mei bertepatan dengan hari lahir BPKP merupakan edisi yang istimewa bagi kami.

Kelegaan luar biasa bagi kami bisa menghadirkan edisi ini di tengah-tengah Pembaca dalam kepadatan pekerjaan yang tinggi dengan periode waktu yang lebih singkat. Menjadi kebanggaan bagi kami menggarap edisi ini, menyajikan bacaan yang bermanfaat bagi Pembaca tepat waktu, pada 30 Mei 2018.

Pembaca yang budiman, pada kesempatan ini, kami mengangkat tema Inovasi Pengawasan untuk Akuntabilitas Pembangunan Negeri sebagai laporan utama. Awak Warta Pengawasan mewawancarai beberapa

stakeholder BPKP untuk *brainstorming* tentang inovasi terkait isu-isu pengawasan guna mewujudkan pemerintah Indonesia yang lebih akuntabel.

Kami juga menghadirkan srikandi-srikandi BPKP yang telah berbagi pengalaman di bidang pengawasan untuk memberikan motivasi bagi para auditor muda dalam meneruskan tugas dan berkarya. Selain itu disajikan pula kepada pembaca, berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke- 35 BPKP.

Di usia yang bertambah satu tahun ini, kiranya BPKP semakin *mature* dan semakin memberikan *value added* bagi para *Stakeholder*. Demikian pula semoga dengan bertambahnya usia Warta Pengawasan, dapat memberikan informasi yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi para Pembaca yang setia.

BPKP Jaya...



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103, **Diterbitkan Oleh:** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519 **Homepage:** www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 3 *Round Up*

Laporan utama

- 5 Inovasi Pengawasan atau Pengawasan yang Meng - Inovasi?
- 10 Tantangan Auditor Internal di Era Disruptif
- 13 35 Tahun Rekognisi dan Kredibilitas BPKP Makin Diperhitungkan
- 15 *Three Lines of Defense* adalah Kunci
- 17 Inovasi Pengawasan Wujudkan *Trusted Advisor*
- 19 *Innovative Culture*, Ciptakan Terobosan Menuju Kelas Dunia

Nasional

- 22 APAFest 2018, Ajang Aksi Akuntansi Zaman Now
- 26 Bincang Auditor Lintas Negara, BPKP dan CCA Bhutan gelar Vicon
- 28 Delegasi Negeri Samba Belajar Praktik IA-CM di Indonesia

30 Tanya Jawab JFA

AAIPI

- 33 AAIPI Wadah Auditor Internal Pemerintah

Kehumasan

- 38 GPR Sebagai Agen Demokrasi, Siapkah?

Liputan Khusus

- 41 35 Tahun Terus Berkarya Wujudkan Pengawasan untuk Akuntabilitas
- 47 Kiprah Perempuan dalam Pengawasan

Komunikasi

- 52 Perkuat Strategi Komunikasi, Perkuat Kinerja Organisasi

Warta Pusat

- 54 Menuju Birokrasi Berkelas Dunia

Susunan Redaksi

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Syaifuddin Tagamal- **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santoso, Priti Pratiwi Bakti, Achdman Kartaatmadja, Slamet Hariadi, Bambang Utoyo, Amdid Very Dharma, Edi Mulia - **Kontributor Tetap:** Heli Restiati, Agus Yuliant, Rini Wartini, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratignyo - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti- **Redaktur Pelaksana:** Dony Perdana- **Redaktur:** Suyadiarto Priyono, Pujito, Dian Setyawati, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N, - **Redaktur Foto:** Sri Lestari - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine- **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah- **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** Gilang Rahmat Hastanto- R. Hanifah - Adi Sasongko

INOVASI UNTUK NEGERI



Mendengar kata inovasi, pasti pikiran pertama yang muncul adalah ide atau pun gagasan baru yang belum pernah ada atau pun diterbitkan sebelumnya. Audit internal sendiri tak lepas dari berbagai inovasi yang muncul karena desakan kebutuhan atau memang evolusi dari pengembangan audit internal itu sendiri.

Era tahun 1950-an kita masih ingat betul kala audit internal hanya dianggap sebagai pengendali keuangan, kemudian di era 2000-an sudah dianggap mitra bisnis terpercaya, saat ini audit internal sudah dalam posisi duduk bersama dengan direksi (*sit at the same table*).

Di sektor publik meskipun inovasi tidak secepat di sektor privat, audit internal juga telah menunjukkan reaksi atas kondisi yang ada. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini yang berada di bawah komando Presiden, telah di posisi yang sangat strategis karena selalu diundang

dalam rapat terbatas (ratas) serta sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden dan diikuti para pimpinan kementerian dan lembaga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat level pemerintahan tertinggi, peran auditor internal dirasakan penting kehadirannya. Selain itu, BPKP juga telah menerapkan “*Audit at the speed of risk*”, di mana audit bersifat cepat sesuai kebutuhan setiap kebijakan atau risiko yang timbul, tidak hanya berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan.

Inovasi pengawasan lain juga ditunjukkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah mewajibkan setiap Unit

eselon I di bawahnya untuk membentuk Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai upaya mengusung konsep tiga lini pertahanan (*three line of defense*). UKI sebagai lini pertahanan kedua yang memiliki fungsi manajemen risiko, ketaatan, dan pengendalian, merupakan bagian dari manajemen sebagai lini pertahanan pertama yang bertanggung jawab sebagai pemilik risiko.

Itjen tentu sebagai lini pertahanan ketiga lebih independen dalam menjalankan fungsinya baik konsultasi maupun penjaminan kualitas, sehingga hasilnya lebih optimal. Bahkan belum lama ini, Kementerian Keuangan juga telah membentuk komite audit yang bertugas untuk memberikan saran-saran strategis terkait pengawasan intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bagi beberapa pihak, penerapan model tiga lini pertahanan ini diyakini akan membuat daya tahan organisasi terhadap risiko-risiko yang dihadapi akan jauh lebih kuat.

Kita tentu paham perubahan peran internal auditor yang lebih strategis dari yang tadinya hanya penyedia jaminan (*assurance provider*) sudah bergerak ke arah penyedia terpercaya (*trusted advisor*). Artinya, auditor internal dituntut lebih memberikan layanan bernilai

tambah selain saran strategis secara proaktif dalam organisasi, sehingga pelaksanaan rencana audit berjalan efektif dan efisien. Untuk meraih predikat tersebut, pengawasan oleh auditor internal harus dilibatkan dalam bisnis proses organisasi, pemanfaatan teknologi, dan fokus dalam nilai organisasi.

Patut dicermati dari sisi teknologi, saat ini mungkin belum terlalu banyak auditor internal pemerintahan yang menyentuh sektor ini. Tetapi dengan memahami kondisi sekarang dan mendatang, auditor internal pemerintahan harus mulai memerhartikan *big data*, keamanan siber, dan analisis data forensik. Upaya tersebut menilik kultur ke depan, banyak generasi milenial yang duduk di sektor publik maupun privat sehingga risiko dari sektor teknologi mampu diantisipasi lebih awal.

Bukan tak mungkin ke depan data audit seluruhnya berbentuk digital, selain itu dengan menguasai teknologi misalnya pengendalian pengadaan barang jasa dan penemuan kecurangan (*fraud*) lebih mudah ditelusuri dan lebih menghemat waktu serta biaya. Semua hal tersebut tentu diperlukan inovasi yang kreatif dan berkualitas dalam pengawasan internal. Ujungnya pembangunan di seluruh pelosok negeri Indonesia berakuntabilitas dan dapat dinikmati rakyat dari berbagai kalangan, seperti yang dirindukan selama ini ■

(dony)



Topik seputar pengawasan seakan tak pernah ada habisnya untuk diulas. Hal ini patut dimaklumi apabila kita berkaca pada berbagai kasus di lingkup keuangan negara yang terkadang justru membelit aparaturnya yang seyogyanya menjaga keuangan negara itu sendiri.

Inovasi Pengawasan atau Pengawasan yang Meng-“inovasi”??

Sebagai publik yang merindukan Indonesia yang maju dan bebas dari perilaku koruptif, sedikit banyak akan timbul pertanyaan keraguan di benak paling dalam, “apakah pengawasan yang dilakukan sudah tepat?” atau “apakah pengawasan yang ada saat ini sudah usang dan tidak sesuai perkembangan zaman?”.

Ketika membahas pengawasan, penulis seringkali teringat akan sebuah film *superhero* yang mungkin kita semua kenal dengan simbol kelelawar di dadanya. Ya..., Batman!! Adapun *scene* yang berkesan bagi penulis dari film berjudul *The Dark Knight* tersebut yaitu ketika

di awal film di mana ada dua orang yang terlihat sedang akan melakukan transaksi ilegal namun salah seorang di antaranya membatalkan transaksi tersebut karena melihat cahaya lampu berbentuk simbol kelelawar di langit malam. Orang tersebut merasakan ketakutan begitu melihat cahaya *bat signal* tersebut, padahal sang empunya simbol tidak sedang berada di sekitarnya. Yang paling penulis garisbawahi dari cuplikan adegan ini adalah bagaimana Batman saat itu telah berhasil merubah paradigma berpikir dari yang semula berani melakukan kejahatan ketika tidak diawasi menjadi tidak berani

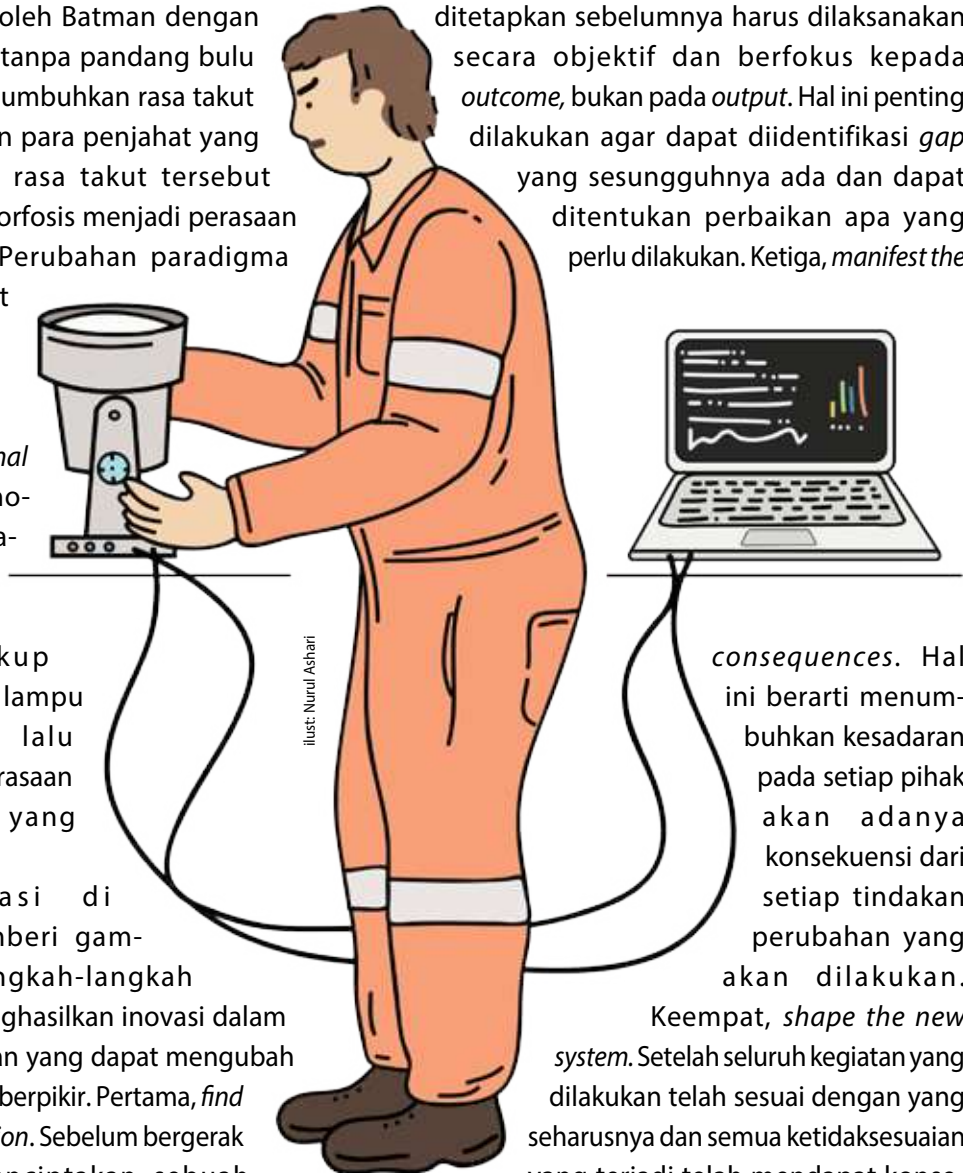
melakukan kejahatan karena merasa terawasi. Hal ini tidak terjadi secepat kilat, namun ini adalah hasil dari manifestasi segala perbuatan pengentasan kejahatan yang telah dilakukan oleh Batman dengan tegas dan tanpa pandang bulu untuk menumbuhkan rasa takut di kalangan para penjahat yang kemudian rasa takut tersebut bermetamorfosis menjadi perasaan terawasi. Perubahan paradigma tersebut telah menjadikan cahaya lampu dari *bat signal* sebagai inovasi pengawasan. Mudah-mudahan, cukup hidupan lampu tersebut, lalu biarkan perasaan terawasi yang bekerja.

Ilustrasi di atas memberi gambaran langkah-langkah untuk menghasilkan inovasi dalam pengawasan yang dapat mengubah paradigma berpikir. Pertama, *find the motivation*. Sebelum bergerak untuk menciptakan sebuah inovasi, perlu dipahami terlebih dahulu apa motivasi dari dilakukannya inovasi tersebut. Dengan adanya motivasi yang tepat, maka

pengembangan dari inovasi yang dilakukan akan lebih terarah, tepat sasaran, dan tepat guna. Kedua, *do as it should*. Dalam mengembangkan sebuah inovasi, berbagai tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya harus dilaksanakan secara objektif dan berfokus kepada *outcome*, bukan pada *output*. Hal ini penting dilakukan agar dapat diidentifikasi *gap* yang sesungguhnya ada dan dapat ditentukan perbaikan apa yang perlu dilakukan. Ketiga, *manifest the*

consequences. Hal ini berarti menumbuhkan kesadaran pada setiap pihak akan adanya konsekuensi dari setiap tindakan perubahan yang akan dilakukan.

Keempat, *shape the new system*. Setelah seluruh kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang seharusnya dan semua ketidaksesuaian yang terjadi telah mendapat konsekuensi yang objektif, maka seluruh repetisi dari tahapan tersebut dibakukan dalam sebuah sistem yang baru. Kelima, *symbolize the*



innovation. Maksudnya adalah memberikan penguatan kepada poin dalam inovasi yang dilakukan untuk mengingatkan kembali seluruh pihak akan tujuan dan motivasi dari inovasi yang tercipta.

Contoh inovasi pengawasan yang dapat dilakukan saat ini yaitu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, kinerja, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang ketiganya saling berhubungan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dibahas di atas, maka dapat ditentukan motivasi (*finding the motivation*) untuk melakukan inovasi pengawasan kali ini adalah menyandingkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, serta maturitas SPIP sehingga selaras dan dapat saling menjelaskan. Untuk mewujudkan hal ini, maka perlu dilakukan penilaian secara objektif terhadap setiap unsur SPIP yang ada, bukan hanya berdasarkan keberadaan dokumennya saja, melainkan juga aksi yang telah dilakukan dari adanya dokumen tersebut (*do as it should*). Dari penilaian tersebut, memadai atau tidaknya SPIP

yang bersangkutan ditelisik ke dalam pencapaian kinerja dan keuangan pemerintah. Dari sini akan dapat diketahui penyebab hakiki dari ketercapaian atau ketidakcapaian kinerja dan keuangan pemerintah itu sendiri (*manifest the consequences*). Selanjutnya, langkah pengawasan yang berjalan ini dilakukan terus-menerus pada setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Repetisi ini yang kemudian akan menjadi sebuah sistem dalam pengawasan dan kemudian dibakukan dalam sebuah prosedur standar (*shape the new system*). Dengan dikaitkannya penilaian maturitas SPIP ke dalam kegiatan pengawasan kinerja ataupun keuangan maka akan menimbulkan paradigma di mana SPIP dipandang sebagai suatu hal yang krusial dan menjadi hal yang paling utama perlu dicapai (*symbolize the innovation*). Dengan demikian, segala pelaporan pemerintah akan lebih memberikan penjelasan yang runut dan sejalan sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih terjaga.

Selain terjaminnya pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, inovasi

*Contoh inovasi pengawasan yang dapat dilakukan saat ini yaitu pengawasan terhadap pelaporan keuangan, kinerja, dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang ketiganya saling berhubungan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dibahas di atas, maka dapat ditentukan motivasi (*finding the motivation*) untuk melakukan inovasi pengawasan kali ini adalah menyandingkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, serta maturitas SPIP sehingga selaras dan dapat saling menjelaskan*



ilust: Nurul Ashari

pengawasan juga akan menumbuhkembangkan peran APIP ke dalam posisi vital dalam pengawasan keuangan dan pembangunan negara. APIP akan dapat berperan dalam menunjukkan arah dan strategi pembangunan yang tepat sehingga inovasi pengawasan yang dilakukan pada akhirnya akan menginovasi pembangunan

nasional secara makro. Inovasi pengawasan dan pengawasan yang menginovasi sejatinya bukanlah dua hal yang kontradiktif, melainkan harus dipandang sebagai hal kausatif yang merubah paradigma ke arah positif. Ketika paradigma tersebut sudah terimplan di dalam sistem pengawasan yang ada, maka inovasi pengawasan yang dilakukan

dikatakan berhasil di mana APIP dapat menjadi *bat signal* bagi pembangunan bangsa, dan itu tanpa harus memakai topeng kelelawar■

(karneji)



Dok: Mujono

PLTG-MG Bontang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang di bangun di Kota Bontang. Pada triwulan 1 tahun 2018, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas sebesar 30 MW telah selesai dan siap beroperasi untuk memperkuat jaringan sistem kelistrikan Mahakam di regional di Kalimantan Timur. PLTG-MG merupakan langkah PT PLN untuk mendukung target kelistrikan sebesar 35.000 MW serta mencukupi kebutuhan pasokan listrik wilayah Kalimantan Timur. Tim BPKP Provinsi Perwakilan Kalimantan Timur pada kegiatan pengawasan reviu atas proyek strategis nasional sedang melakukan dokumentasi mesin pembangkit.

dok: Humas BPKP



Perubahan di segala bidang, berjalan sangat cepat, fundamental dengan mengubah pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru, bahkan tidak dapat diprediksikan saat ini yang dikenal sebagai *era of disruption*, berdampak pada seluruh lini kehidupan. Tak terkecuali bagi eksistensi auditor internal baik sektor pemerintahan maupun privat.

E*ra of disruption* bisa menjadi tantangan dan peluang jika dilakukan antisipasi dini, tidak hanya sekedar menjadi momok yang menakutkan.

Berdiskusi lebih jauh dengan sosok Hari Setianto, *President Institute of Internal Auditors* Indonesia sekaligus Direktur Investasi dan Keuangan PT. ASABRI serta

seabreg jabatan lain menjadi lebih menarik dengan menengulas lebih jauh tantangan auditor internal saat ini. Hari berpendapat, "Tantangan di *era of disruption* ini semua pihak khususnya internal auditor harus senantiasa melakukan inovasi. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan, pertama adalah harus membangun navigasi yang baik".

"Jika dulu cukup dengan Repelita saat ini tidak bisa karena pengaruh dari luar sangat besar sehingga tanpa navigasi akan sulit menemui *true north*. BPKP maupun APIP berperan penting dalam hal itu, apakah sudah melakukan audit Renstra?", ungkap Hari. Faktor strategik sangat mempengaruhi keberhasilan sehingga internal auditor harus lebih fokus pada audit strategik tidak lagi hanya menangani keuangan dan operasional.

Menghadapi gelombang perubahan yang begitu cepat, *risk management* juga menjadi semakin penting. Hari menilai, "Selama ini *risk management* sudah mulai diterapkan namun masih bersifat parsial/silo oleh masing-masing bagian/divisi. Hal ini harus diintegrasikan

oleh auditor internal merujuk konsep GRC (*Governance – Risk – Control*) sehingga dapat menerapkan *combined risk management* secara lebih komprehensif”.

“Kedua, organisasi maupun auditor internal harus bisa *“agile”*, berubah dengan cepat dalam keadaan bergerak tanpa kehilangan keseimbangan”, ungkap pria kelahiran Purbalingga ini. Setiap institusi harus mampu berbuat demikian sehingga diperlukan sifat-sifat fleksibel dengan melakukan *empowerment* kepada seluruh karyawan agar mampu mengambil tindakan sesuai perubahan yang terjadi sehingga tercipta inovasi, kreativitas dan sebagainya.

Untuk mencapai hal tersebut namun tetap menjaga keseimbangan organisasi harus ada pondasi berupa *culture/ soft control*. Dengan perubahan organisasi yang

semakin fleksibel karena harus berjalan cepat, tantangan ke depan auditor internal adalah memperkuat *culture* dengan melakukan audit etik, *audit integrity* dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai penting organisasi tetap dipegang teguh, ada pemberian maaf untuk kesalahan namun *zero tolerance* untuk kecurangan.

Bagi auditor internal untuk mendukung hal tersebut, audit harus cepat sesuai risiko yang timbul *“Audit at the*

speed of risk”,

sehingga PKPT tahunan menjadi tidak relevan, harus sering direvisi seiring perubahan yang terjadi. Hari mengapresiasi kiprah BPKP saat ini, “BPKP menurut saya saat ini sudah menerapkan hal tersebut dimana BPKP sudah menerapkan *“seat at the same table”*, di mana Kepala BPKP saat ini selalu dilibatkan dalam rapat kabinet sehingga internal auditor sudah menempati posisi yang setara dan dilibat-

kan sejak pada proses pengambilan keputusan. Selain itu, BPKP juga telah menerapkan *“Audit at the speed of risk”*, di mana audit bersifat cepat sesuai kebutuhan setiap kebijakan”.

Lulusan University of Birmingham pada jurusan *Accounting and Finance* ini menyebutkan, selain dua hal di atas, di era milenial ini setiap organisasi harus memperluas orientasinya tidak hanya semata-mata *profit*. Istilah yang telah banyak dikenal

adalah konsep 3 P, *Profit, People dan Planet*. Sebagai organisasi pemerintah juga harus mengacu ke konsep tersebut. “Pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai harus bersifat *inclusive sustainable growth*. Pembangunan harus dapat mendorong partisipasi dari seluruh komponen masyarakat sehingga turut menikmati tidak hanya menjadi penonton, keberlanjutannya juga harus diperhatikan utamanya terkait isu-isu lingkungan”, jelas Hari.

Menanggapi kondisi APIP



saat ini, Hari berpendapat, "Kondisi APIP secara umum saat ini belum berorientasi ke konsep *three lines of defense*, dimana setiap elemen pada masing-masing institusi harus mampu mengelola setiap *risk* yang ada. Saat ini sebagian besar APIP baru menerapkan salah satu bagian (*subset*) saja yaitu audit keuangan itupun bersifat masa lalu sehingga belum mampu membantu *top*

melakukan seluruh jenis audit tidak hanya berkutat pada audit keuangan dan operasional.

Demikian halnya dengan anggaran yang saat ini dirasa masih minim karena pola penganggaran yang bersifat *incremental*, perlu dipikirkan ke depan agar dapat tercapai keseragaman pada jumlah yang memadai merujuk hasil-hasil *survey* yang telah banyak dilakukan akhir-akhir ini salah

Hari juga menjelaskan lebih lanjut mengenai inovasi yang telah dilakukan di IIA saat ini yaitu berupa 5 tujuan, pertama meningkatkan kualitas *membership* dengan meningkatkan partisipasi peserta ujian yang menggunakan bahasa Indonesia (*translation*), *professionalism*, *advokasi*, *governance* dan membangun SDM dengan perekrutan staf tetap.

"Tujuan akhir internal



ilust: aesc.org

management dalam mengantisipasi *risk* dan hal-hal strategis yang harus diperbaiki ke depan".

Merujuk ke konsep 10 *principles* pada standar IIA, untuk mencapai kondisi ideal, auditor internal harus menempati posisi yang tepat, mendapat dukungan SDM yang berkualitas dan anggaran yang cukup. SDM APIP juga harus didorong untuk mampu

satunya oleh IIA. Sejalan dengan audit yang semakin fleksibel, penganggaran juga harus mengakomodasi hal tersebut.

Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP juga harus semakin intens mengembangkan unit Audit Teknologi Informasi, "Metode *sampling* sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke *data analytic*", tegas Hari.

auditor adalah menjadi *trusted advisor*, tentu dengan terus berorientasi kepada *risk* sehingga dapat menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk turut berorientasi pada *risk* dengan demikian pimpinan akan semakin membutuhkan auditor internal", pungkas Hari ketika ditanya tentang harapannya ke depan terhadap pengawasan internal di Indonesia■

(Dian)

Tahun 35 Rekognisi dan Kredibilitas BPKP makin Diperhitungkan

Memasuki usia 35 tahun bukanlah usia yang muda, namun sudah dianggap cukup *mature* sebagai organisasi yang bergerak di bidang pengawasan. Dalam meniti perjalanannya sebagai organisasi yang cukup matang, pernah mengemuka isu-isu bahwa BPKP dianggap tumpang tindih dengan lembaga pengawasan lain. Tidakkah yang bersuara demikian paham akan peran BPKP sebagai lembaga pengawasan lintas sektoral?

Program lintas sektoral dari sudut pandang pengawasan dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana kerja yang melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selain BPKP karena keterbatasan kewenangan. Hal inilah yang ditangkap oleh Tim W a r t a



dok: Humas BPKP

Deputi Menteri PPN Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Slamet Soedarsono

Pengawasan saat wawancara dengan Deputi Menteri PPN Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Slamet Soedarsono di ruang kerjanya. Sosok yang ramah ini mengatakan bahwa hanya BPKP yang dapat memotret pengawasan lintas sektoral.

“Siapa yang tidak butuh pengawasan intern? Semua organisasi butuh. Pengawasan oleh inspektorat tentunya masih silo. Lalu, kalau bukan BPKP, siapa lagi pengawas intern pemerintah secara menyeluruh? Dewasa ini spiritnya HITS, *holistic, integrative*, tematik, dan spasial.

Sinergi antar kementerian/ lembaga adalah keniscayaan” ujar pria paruh baya ini.

Slamet lebih lanjut mengungkapkan, “Dewasa ini peran BPKP makin *advanced*. Keterlibatan pimpinan BPKP dalam rapat-rapat strategis seperti ratas dan sidang kabinet makin intens. Ini artinya *recognition* dan pengakuan atas kompetensi dan kredibilitas BPKP sebagai lembaga pengawasan semakin meningkat. Ini sekaligus peluang bagi BPKP untuk memberikan saran peningkatan akuntabilitas program pemerintah,” ujar Slamet.

Pria yang pernah lima tahun menjabat sebagai Inspektur Utama Kementerian PPN/ Bappenas ini tentu sangat

mumpuni di bidang pengawasan. Slamet menyatakan, ke depan, ada tantangan baru untuk BPKP. Ada inovasi di Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019-2024 nanti. RKP 2019-2024 tidak hanya didedikasikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga memuat suplemen khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. “Tentu saja ini berimplikasi pada kaidah-kaidah yang berbeda, regulasi berbeda, dan risikonya pun berbeda. Sebagai Pembina APIP, BPKP harus *aware*. Apakah APIP sudah siap menghadapi ini ketika bertugas mereviu perencanaan dan penganggaran,” pungkas Slamet mengakhiri wawancara ■

-ais



ilust: idy



dok: Humas BPKP

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-35 BPKP, Tim Warta Pengawasan menemui beberapa *stakeholders* BPKP untuk menggali ide-ide terkait pengawasan sebagai bekal BPKP dalam memaknai pertambahan usianya yang ke 35. Salah satu *stakeholders* yang kami temui adalah Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Roni Dwi Susanto.

Pejabat yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Litbang KPK ini baru saja menerima penghargaan dari Kepala BPKP atas tercapainya level 3 Kapabilitas APIP Bappenas Februari lalu. Ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan pengawasan intern di Bappenas telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar; mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program/kegiatan dan memberikan konsultasi terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Terkait pencapaian itu Roni menjelaskan, "Sebenarnya *three lines of defense* adalah kuncinya. Jika implementasi atas teori itu sudah mapan, APIP dapat

melangkah ke peran yang strategis yaitu *early warning system* melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*, tidak lagi ke arah ketaatan saja. APIP juga bisa mulai konsentrasi ke arah inovasi pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan” ujar Roni.

Roni lebih lanjut menuturkan, di Bappenas sendiri, terdapat beberapa inovasi pe-

gai Irtama, Roni bercerita bahwa permasalahan klasik inspektorat di Indonesia adalah inspektorat masih harus masuk ke *level first line of defense*. “Ini kan menyita waktu dan tenaga, terlalu berat. Selain itu, manajemen juga belum sadar akan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Ini yang harus kita sadarkan,” tegas Roni.

akan melakukan itu, karena BPKP memegang nilai-nilai luhur PIONIR. Di Bappenas sendiri pada tahun 2016 dinilai masih berada di level 2, sedangkan banyak *area of improvement* yang telah kami dorong dan dilakukan oleh manajemen. Meskipun demikian, kami yakin di tahun 2018 Bappenas akan mencapai SPIP level 3. Sedangkan untuk level nasional, apabila target



ilust: Actuaries Digital

ngawasan. Bappenas telah mengembangkan *database* unit kerja yang terkomputerisasi dan terintegrasi untuk *continous audit continuous monitoring*. Selain itu, Bappenas juga sudah melangkah ke e-audit untuk transaksi-transaksi tertentu, khususnya transaksi-transaksi keuangan.

Setahun menjabat seba-

Ketika Tim Warta Pengawasan menanyakan tentang target SPIP level 3 di RPJMN 2014-2019, “Tinggal satu tahun lagi. Sebenarnya BPKP bisa saja memberikan penilaian yang baik karena kewenangan menilai ada di BPKP. Semua dinilai level 3 dengan begitu target tercapai. Tapi saya sangat yakin, BPKP tidak

ini belum bisa tercapai, yang terpenting adalah BPKP telah melakukan upaya-upaya untuk pencapaian tersebut, dan BPKP harus bisa memetakan apa permasalahannya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun RPJMN 2020-2024 nanti,” tutup Roni■

-ais

...”Metodologi berbasis teknologi harus sudah menjadi hal yang mandatory dalam SPI. Karena bagaimanapun, semakin luas cakupan bisnis, geografis, kalau kita gak memperkuat metodologi dengan teknologi, ya akan semakin keteteran dari sisi pengawasan”.



dok: Humas BPKP

Ketua Forum Komunikasi
Satuan Pengawasan Intern – Saiful Huda

Inovasi Pengawasan Wujudkan *Trusted Advisor*

Berdiri selama 33 tahun di dunia pengawasan intern tentu bukan waktu yang singkat bagi Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI). Organisasi yang beranggotakan unit audit internal BUMN, BUMD, instansi pemerintah, dan swasta ini kini diketuai oleh Saiful Huda, Kepala SPI pada PT. Mandiri Utama Finance.

Didirikan pada tanggal

12 Desember 1985 di Selabintana, Sukabumi, FKSPI memiliki kaitan erat dengan BPKP. Pada saat itu, Kepala BPKP Gandhi mengukuhkan forum ini dan berharap agar ke depannya dapat menjadi sarana pengembangan profesi para auditor internal. Awalnya, FKSPI hanya menaungi unit-unit satuan pengawasan intern (SPI) BUMN saja. Namun seiring perkembangannya, terdapat perubahan anggaran dasar

tahun 2010 sehingga FKSPI terbuka bagi unit SPI lain.

Adanya beragam isu terkait penguatan sistem pengendalian intern, seperti kapabilitas auditor dan posisi unit SPI dalam struktur kelembagaan mendorong FKSPI untuk secara berkala menyelenggarakan *sharing session* dengan para anggotanya. Dalam *sharing session* tersebut, anggota dapat sekaligus melakukan

benchmark dengan anggota lain yang telah menerapkan *internal audit best practice*. Tidak hanya itu, Saiful menuturkan bahwa forum ini juga berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dalam pembuatan kebijakan, seperti saat perumusan Peraturan Menteri BUMN tentang *Good Corporate Governance*, sebagai bentuk optimalisasi peran SPI.

“Selama ini kami memang berfokus pada anggota, seperti bagaimana peningkatan kapabilitas. Kita berharap anggota semakin *capable*, kematangan SPI semakin bagus, sehingga nilai tambah bagi perusahaan juga semakin bagus. Tapi kami sadar, jika hanya berfokus pada anggota, tanpa kontribusi formal kepada regulator, maka peran SPI juga akan kurang optimal”, jelas Saiful. Koordinasi dengan *stakeholder* pengambil kebijakan dinilai penting untuk meningkatkan *awareness* manajemen terhadap fungsi SPI.

Sebagaimana tujuan dari SPI adalah untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, Saiful menilai tantangan bagi SPI adalah bagaimana menjadi *trusted advisory*. Untuk mewu-

judkan hal tersebut tentu dibutuhkan inovasi-inovasi dalam hal metodologi dan pengembangan SDM (*people development*). “Metodologi berbasis teknologi harus sudah menjadi hal yang *mandatory* dalam SPI. Karena bagaimanapun, semakin luas cakupan bisnis, geografis, kalau kita gak memperkuat metodologi dengan teknologi, ya akan semakin keteteran dari sisi pengawasan”, ujarnya.

Inovasi dalam pengawasan merupakan hal fundamental guna mewujudkan misi audit internal sebagai penyedia *insight* (wawasan dan rekomendasi). Saiful sendiri memandang fungsi *insight* sesuatu yang seharusnya *looking forward*. “Jadi intinya, auditor internal juga harus bisa melihat perkembangan bisnis ke depan. Dalam konteks ini, *insight* tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tapi juga menyampaikan kepada manajemen risiko-risiko apa yang mungkin muncul”, jelas pria lulusan Universitas Gadjah Mada ini.

Adapun hal yang perlu ditelaah kembali terkait penerapan *risk based* tersebut,

Saiful menilai terkadang penerapannya masih kurang menyentuh sisi *strategic* organisasi. “Seharusnya *risk based audit* itu berangkat dari strategi. Tujuannya apa, risiko paling besar apa, nah kita masuk ke sana. Karena *strategic risk* itu yang paling utama bagi perusahaan. Jadi terkait insight ini tantangannya seperti itu”, sambungnya.

Adapun harapannya, baik bagi FKSPI maupun dunia pengawasan internal, SPI dapat berperan lebih strategis melalui fungsi-fungsinya, yaitu *assurance*, *advice*, dan *insight*. Selain itu, SPI juga harus bisa menjembatani *gap* yang selama ini ada antara *stakeholder* dan *audit internal*. “Ke depan, porsi pemberdayaan dalam hal ini untuk meminimalisir *gap* harapan direksi dan harapan audit harus kita perkecil. Perlu lebih banyak *approach* kepada direksi BUMN agar semua paham fungsi audit yang sesuai *best practice* itu seperti apa”, tutup Ketua FKSPI yang kedua belas ini ■

nadia



Kepala BPKP – Ardian Adiperdana

Innovative Culture, **Ciptakan Terobosan menuju Kelas Dunia**

“Ke depan, akan terus ada ruang-ruang baru yang memang memerlukan peran-peran baru, produk baru yang dikehendaki perkembangan zaman. Untuk itu, ruang untuk melakukan *improvement* selalu terbuka. Jadi, jangan tinggalkan *innovative culture* yang ada”.

Profesi auditor internal dalam melakukan pekerjaan tidak terlepas dari aturan baku, kertas kerja maupun standar prosedur atau pedoman teknis, namun demikian hal tersebut tidak menutup adanya ruang untuk berinovasi bagi auditor internal.

Inovasi dalam profesi audit internal dibutuhkan dalam menjaga agar pedoman/standar

rapatnya menjelaskan pentingnya inovasi bagi auditor BPKP. "Ke depan, akan terus ada ruang-ruang baru yang memang memerlukan peran-peran baru, produk baru yang dikehendaki perkembangan zaman. Untuk itu, ruang untuk melakukan *improvement* selalu terbuka. Jadi, jangan tinggalkan *innovative culture* yang ada", pesan Ardan.

Berawal dari visi reformasi

sampaikan Ardan bahwa BPKP tidak dapat berjalan sendiri.

Menurutnya pertama, dibutuhkan ukuran-ukuran berkelas dunia yang dalam hal ini telah diinternalisasikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla ke dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, Ardan juga menerangkan bahwa *trusted advisory* telah diupayakan BPKP sejak lama. Jika dilihat dari tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan *strategic issues* nasional, seperti PSN, kemiskinan, dan dana desa, "ini tentu dikarenakan kualitas pelayanan/produk yang terjaga dan selalu peka terhadap kebutuhan *stakeholder*", jelas Ardan.

Kedua, adaptasi *international best practice* yang didukung strategi komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan sumber daya pengembangan aparat pengawasan intern berkelas dunia, seperti *Institute of Internal Auditors* (IIA). Dan ketiga, melihat apa yang telah dilakukan di tempat lain (*benchmarking*), di antaranya memenuhi undangan *Organisation for Economic*



dar yang ada selalu mutakhir sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proses bisnis. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang sangat disruptif, inovasi menjadi modal penting bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk siap menghadapi masa depan.

Kepala BPKP Ardan Adi-perdana saat diwawancarai tim Warta Pengawasan di ruang

birokrasi bahwa aparat sipil negara harus berkelas dunia, tentu harus diikuti dengan pengawasan intern yang juga mengimbangi kemampuan para eksekutif pelaksana program. Oleh karena itu, visi BPKP untuk menjadi auditor internal yang berkelas dunia adalah suatu capaian yang tak dapat terwujud tanpa adanya sebuah terobosan. Untuk mewujudkan hal tersebut, di



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (kanan) menjadi pembicara dan memenuhi undangan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk menyampaikan apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk BPKP

Cooperation and Development (OECD) untuk menyampaikan apa saja inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk BPKP.

Dalam mencapai target RPJMN 2015-2019, terobosan yang dilakukan oleh BPKP antara lain penggunaan IT, penyiapan produk tematik untuk aktivitas yang berisiko tinggi (PBJ, revidi perencanaan dan penganggaran, perizinan, dan lain - lain), dan penyempurnaan metode. "Yang kita lakukan adalah akselerasi program. Jadi ini betul-betul menjadi program yang sangat prioritas bagi BPKP di seluruh Indonesia.

"Selanjutnya terkait struktur (*structure follows strategy*) akan disesuaikan agar pelaksanaan tugas bisa lebih efektif",

sambungannya.

Adapun penyusunan instrumen pengukuran SPIP dan adaptasi IACM dalam peningkatan kapabilitas APIP merupakan *roadmap* bagi BPKP dan APIP lainnya, agar bergerak ke arah satu titik yang sama, sehingga APIP dapat menjadi pilar yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.

"Tingkat kematangan bisa menjaga akuntabilitas. Jika ada pertanyaan mengapa masih saja ada penyimpangan, ya karena memang potretnya pada saat ini belum cukup berada di level yang memadai untuk menjaga akuntabilitas", terang Ardan.

Di akhir perbincangan, menjelang HUT ke-35 BPKP

(tanggal 30 Mei 2018) Ardan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran personil BPKP, pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun pejabat fungsional lainnya atas kerja keras dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

"Inovasi yang selama ini dilakukan telah relevan dengan *role* kita. Tentunya inovasi ini harus tetap berlanjut dan diperlukan kepekaan yang tinggi atas perubahan lingkungan yang cepat serta menyesuaikan dan bahkan antisipatif dan proaktif atas perubahan. Kalau perlu, kita yang melakukan perubahan". Mengutip Peter Drucker, *the most effective way to manage change is to create it* ■

nadia



APA Fest 2018

Ajang Aksi Akuntansi Zaman Now

Tampang serius nampak diratusan muka mahasiswa yang memadati *main hall* Bursa Efek Jakarta hari itu (19/4). Beberapa peserta yakni mahasiswa akuntansi memakai jaket almamater untuk berlaga pada *Aspiring Professional Accountant Championship* (APACChamp) 2018 sebagai rangkaian *Aspiring Professional Accountant Festival* (APAFest) 2018 yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Sebagai asosiasi profesi akuntan terbesar di Indonesia IAI serius menunjukkan komitmennya untuk mendukung potensi generasi muda akuntan Indonesia dan mempertemukan talenta akuntansi terbaik di negeri ini dengan entitas terkemuka di Indonesia dan regional.

Pertama digelar pada tahun 2017 sebagai rangkaian peringatan 60 tahun IAI, APAfest diikuti lebih dari 1200 peserta dan 29 eksibitor dari berbagai perusahaan terkemuka di tanah air. Tahun ini, APAFest diisi dengan rangkaian *career fair* yang diikuti 20 institusi terkemuka di tanah air dan lebih dari 500 peserta peraih beasiswa *Chartered Accountant (CA)*, pemegang sertifikasi CA, CPSAK, USAS, dan USAAP, finalis *APACHamp*, undangan dari IAI *Affiliated Campus*, mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi terpilih, serta anggota muda IAI dengan IPK minimum 3,25. Artinya dari segi kualitas meningkat dari sebelumnya.

Kompetisi *APACHamp* diikuti oleh tim dari 42 perguruan tinggi di seluruh



Direktur BEI dan seluruh anggota dewan penasihat IAI membuka perdagangan saham di BEI

dok: Humas BPKP

Indonesia dengan finalis delapan tim terpilih yang telah melewati proses seleksi di delapan kota besar di Indonesia. *Deus Team* dari Universitas Indonesia tahun ini terpilih sebagai juara pertama. Lewat program ini, diharapkan akan terbangun sebuah mekanisme yang saling mendukung yang pada akhirnya akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang makin tinggi di lingkup bisnis Indonesia.

Sesaat sebelum bersama Direktur BEI dan seluruh anggota dewan penasihat IAI membuka perdagangan saham di BEI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana dalam

sambutannya mengatakan jika akuntan profesional sebagai pihak yang kompeten dalam menyajikan informasi keuangan serta menjadi bahan pengambilan keputusan eksekutif, bisa terlibat lebih jauh di dalam setiap proses. "Kontribusi itu tidak terbatas pada sektor tertentu, tapi kini justru telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari sektor publik hingga sektor privat," ujar Ardan.

Ardan yang juga anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI tersebut juga mengatakan bahwa lebih dari 35 tahun berkecimpung di bidang audit internal pemerintah, kebutuhan dan dukungan akan akuntan profesional adalah benar

dok: Humas BPKP



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana

nyata dan dibutuhkan, untuk mendorong dan memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan.

Terakhir, Ardan mengingatkan pada para generasi muda akuntan dalam membangun pondasi yang kuat bagi karir dan masa depan agar menguasai ilmu akuntansi dengan sungguh-sungguh serta lulus kuliah dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. "Jangan ketinggalan untuk ikuti perkembangan akuntansi baik secara keilmuan maupun praktis. Selain itu, bergabung sejak dini dengan keprofesian terbukti mampu mendukung perkembangan karir di masa depan," imbuhnya.

Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat sesi inspirasi menyampaikan bahwa jabatan bukan hal terpenting dalam bekerja, bagaimana menunjukkan karya nyata lebih utama. "Jangan mencari jabatan, tapi carilah karya. Perubahan *mind set* kita yang

bisa menjadi agen perubahan, tidak bisa kita harapkan perubahan itu orang lain, tapi dari diri kita sendiri" kata Jonan.

Jonan merupakan Anggota Dewan Penasihat IAI yang lebih dikenal sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), karena selama menjabat sebagai Dirut KAI, Menteri Jonan berhasil mentransformasikan operasional KAI hingga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Jonan berpesan agar dalam menjalankan profesinya kelak para calon akuntan harus transparan serta mampu mengikuti perkembangan zaman digital. "Kalau bekerja fokuslah pada hasil jangan hanya proses.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) - Ignasius Jonan

dok: Humas BPKP



Wamenku dan Ketua IAI, Mardiasmo bersama pemenang APACHamp 2018, *Deus Team* dari Universitas Indonesia

Fokus kepada proses memang baik, tapi orang yang fokus kepada proses adalah orang yang tidak ingin membuat kemajuan dengan baik," ujarnya.

Ilmu tata kelola (*governance*) dan manajemen risiko yang dikuasai, dirasa turut serta menjaga inovasi yang diciptakan akuntan sesuai dengan nilai sosial dan moral di masyarakat. *Partner EY Indonesia*, Isnaeni Achdiat, mengungkapkan jika pada era digital seperti sekarang, akuntan zaman *now* harus turut memperhatikan *big data*. Tidak hanya data keuangan, tetapi juga data-data non-keuangan seperti data-data dari eksternal, termasuk media sosial.

"Data operasional non-keuangan lainnya adalah tingkat curah hujan, dan kepuasan pelanggan. Semua data harus dilakukan analisis untuk memperkaya pengambilan keputusan," tambahnya. Isnaeni menuturkan, data yang dikuasai secara komprehensif membantu akuntan untuk berinovasi dan memberikan gagasan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan IAI sebagai organisasi profesi akuntan bertanggungjawab mengembangkan pengetahuan dan praktik akuntansi,

manajemen bisnis, dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial dalam perspektif nasional dan internasional.

Apreasiasi diberikan Mardiasmo atas komitmen sejumlah perusahaan terkemuka tanah air yang ikut serta di ajang ini seperti PT Astra Internasional Tbk., PT BCA Tbk., PT Bursa Efek Indonesia, EY Indonesia, KPMG, PT Bank Permata Tbk., PwC, dan Bank CIMB Niaga Tbk yang akan memprioritaskan finalis APACHamp untuk mendapatkan karir terbaik di institusinya.

Melalui program seperti ini, profesi akuntansi dan dunia bisnis di Indonesia sangat diuntungkan karena dapat menjaring sekaligus mengasah bibit-bibit terbaik yang berpotensi menjadi pemimpin dunia bisnis kelak. Dalam jangka panjang, perekonomian Indonesia juga memperoleh kepastian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan■

(Dony)

Jarak dan waktu tak jadi soal untuk dua negara saling bertukar pikir.

Terlebih di era digital ini, melalui *video conference* (vicon), komunikasi terasa nyata, seakan-akan berhadapan langsung. Ya, teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh BPKP dan *Central Coordinating Agency for Internal Audit Service* (CCA) Bhutan. Keduanya melakukan *video conference* untuk *sharing knowledge* tentang pelaksanaan pengawasan internal di masing-masing negara (30/4/2018).



dok: Humas BPKP

Suasana saat video conference dengan CCA Bhutan

Bincang Auditor Lintas Negara, BPKP dan CCA Bhutan gelar vicon



dok: Humas BPKP

Sekretaris Utama - Dadang Kurnia(kiri) didampingi Senior Financial Management Specialist World Bank Indonesia - Novira Asra serta pejabat struktural BPKP lainnya melakukan video conference untuk sharing knowledge tentang pelaksanaan pengawasan internal di masing-masing negara

Video conference kali ini dimoderatori oleh *World Bank* India dan untuk pihak Indonesia dilaksanakan dari ruang *vicon* Kantor Pusat BPKP, dihadiri pejabat struktural BPKP serta dipimpin oleh Sekretaris Utama Dadang Kurnia, dan *Senior Financial Management Specialist World Bank* Indonesia Novira Asra.

Dadang menyampaikan tentang bagaimana BPKP sebagai auditor intern pemerintah Indonesia menduduki posisi strategis di bawah presiden dan aktif menjadi penjamin mutu serta konsultan program-program pemerintah.

Lebih lanjut, Dadang menceritakan tentang peran BPKP sebagai pembina APIP di Indonesia.

Selain itu Sesma juga menjelaskan bahwa setiap tahunnya Pusdiklatwas BPKP yang melaksanakan diklat bagi 12.000 auditor ini, juga telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara. Pusdiklatwas juga telah mengimplementasikan ISO 9001-2008 dari *TUV Nord Germany*. Pusdiklatwas BPKP juga telah memiliki



Sekretaris Utama BPKP - Dadang Kurnia(kiri) dan *Senior Financial Management Specialist World Bank* Indonesia Novira Asra

...“Setiap tahunnya Pusdiklatwas BPKP melaksanakan diklat bagi 12.000 auditor, telah mengimplementasikan ISO 9001-2008 dari TUV Nord Germany, serta telah memiliki akreditasi penyelenggaraan diklat PBJ dari LKPP”

akreditasi penyelenggaraan diklat PBJ dari LKPP. Selain memperkenalkan Pusdiklatwas, Sesma juga menjelaskan tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, baik di sisi regulasi, kebijakan pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan karirnya.

CCA Bhutan memiliki kendala terkait kapabilitas dan jenjang karir auditor di sana, sehingga tertarik untuk

melakukan *benchmark* terhadap pembinaan kompetensi dan perkembangan karir auditor internal di Indonesia. Bhutan berharap dapat berkolaborasi dengan BPKP untuk meningkatkan *capacity building* dalam hal *internal audit capability*, metodologi *audit report*, *quality assessment*, dan *risk management*.

Untuk selanjutnya, simpulan hasil tukar pikiran ini akan dituangkan dalam MoU dengan lingkup yg akan didiskusikan lebih lanjut■

(catur)

Delegasi Negeri Samba Belajar Praktik IA-CM di Indonesia

Upaya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia, yang mengadopsi konsep *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) dari *The Institute of Internal Auditor* (IIA) rupanya menjadi perhatian di tingkat dunia. Salah satu negara yang tertarik dengan implementasi IA-CM di Indonesia adalah Brazil, negeri yang terkenal dengan bola dan tari Sambanya.



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana (tengah) menjelaskan kondisi penerapan IA-CM di BPKP kepada Delegasi Brazil

Ketertarikan Pemerintah Brazil tersebut diawali dari kegiatan *video conference* yang dilaksanakan di kantor *World Bank* Indonesia pada tanggal 5 Desember 2017, antara *Office of Comptroller General/CGU* Brazil dengan Perwakilan APIP di Indonesia. Dilatarbelakangi juga dengan kondisi penerapan IA-CM pada unit *internal audit* pemerintah Brazil yang masih bersifat

parsial, mereka memandang perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana implementasi penerapan IA-CM di Indonesia.

Delegasi Pemerintah Brazil melalui Asosiasi *Internal Control* Pemerintah Brazil (CONACI) akhirnya mengunjungi Indonesia pada tanggal 23 April sampai dengan 28 April 2018, dengan tujuan utama mengetahui bagaimana kebijakan implementasi IA-CM

yang dilaksanakan BPKP sebagai instansi pembina APIP.

CONACI mengirimkan tiga orang delegasi yaitu Liane Vasconcelos de Araujo Angoti (*Deputy of The General Comptroller of The Federal Distric*), Paulo Ribeiro Lemos (*Special Assessor of The General Comptroller of Federal Distric*), dan Rodrigo Stigger Dutra (*Manager of Internal Audit of Human Resources of The State of Santa Catarina*).

Selama sepekan berkunjung di Indonesia mereka tidak hanya melakukan diskusi dan *sharing experience* dengan BPKP, namun juga dengan lembaga lain yaitu Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, PT Kereta Api Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut bertujuan agar para delegasi dapat mempelajari praktik terbaik implementasi peningkatan kapabilitas APIP di Indonesia dengan pendekatan IA-CM sebagai *international best practice*, implementasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), penerapan Manajemen Risiko, *Three lines of Defense*, CAAT (*Computer Assisted Auditing Technique*), serta bagaimana pengaruh kapabilitas unit audit intern terhadap transformasi bisnis pada badan usaha milik negara agar diperoleh gambaran yang komprehensif dan terstruktur.

Pemimpin rombongan delegasi, Liane Angoti, menyampaikan kesannya selama melakukan *sharing experience* dengan beberapa lembaga di Indonesia. Liane sempat menanyakan kepada APIP dan SKPD terkait mengenai fungsi pengawasan intern untuk mengetahui apakah mereka memahami tugas APIP. Para *stakeholder* ternyata merasakan manfaat dan merasa terbantu dengan adanya pengawasan intern.

Liane mengungkapkan “saya juga semakin memahami peran BPKP. BPKP telah berhasil memberikan pemahaman kepada APIP di Indonesia mengenai perannya dalam membangun kapabilitas APIP dan *good governance*. BPKP mampu berkolaborasi dengan baik dengan semua *stakeholders*. *Congratulation*” ■

Ratna



Delegasi Brazil berbincang dengan Irjen Kementerian Keuangan RI - Sumiyati



Mendengar langsung *Sharing experience* dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan



Melihat langsung hasil transformasi bisnis pada PT. KAI Bandung



Berkunjung ke Pemkab Sumedang, Jabar.



**Kepala Pusat
Pembinaan JFA BPKP
Edi Mulia**



**Kepala Pusat Pendi-
dikan dan Pelatihan
Pengawasan BPKP
Djoko Prihandono**

Pertanyaan:

Yth Kepala Pusbin JFA di Jakarta

Saya adalah Kepala SPI pada Universitas yang setara dengan Eselon IVa, Pangkat saya sekarang IIIc, dan umur saya 47 tahun yang ingin saya tanyakan

1. Sebagai kepala SPI jika akan melakukan kegiatan Audit, apakah harus memiliki sertifikat auditor.
2. Jika saya mengikuti diklat pembentukan Auditor pada jenjang diklat apa yang saya harus ikuti.
3. Apakah ada hubungannya dengan Gelar PIA (Profesional Internal Auditor) yang diselenggarakan oleh PPA&K STAN dengan sertifikasi auditor yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP
4. Diklat sertifikasi auditor untuk pindah ke JFA apakah hanya diselenggarakan oleh PUSDIKLATWAS BPKP.

**Dedi Hendrik dari Inspektorat
Kabupaten Langsa**

Jawaban:

Kepada Saudara Dedi Hendrik di Inspektorat Kabupaten Langsa

1. Pelaksanaan Audit Intern Pemerintah harus dilakukan oleh Auditor yang profesional dan kompeten.
2. Sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Peme-

rintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa Auditor yang profesional dan kompeten harus memiliki kompetensi keahlian Auditor yang tersertifikasi melalui program sertifikasi JFA

3. Sebagai Kepala SPI agar dapat mengelola unit pengawasan dengan baik, Saudara dapat mengikuti Diklat Manajemen Pengawasan, dan agar dapat melakukan pengendalian mutu hasil pengawasan Saudara dapat mengikuti diklat-diklat teknis substansi pengawasan yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP.
4. Jika Saudara berminat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, dapat mengikuti terlebih dahulu dan lulus Diklat Pembentukan Auditor Ahli jika berpendidikan minimal S1/D IV atau diklat Pembentukan Auditor Terampil jika berpendidikan minimal D III sebagai persyaratan pengangkatan dalam JFA.
5. Gelar PIA tidak berhubungan dengan Diklat Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP, karena diklat sertifikasi yang diselenggarakan Pusdiklatwas BPKP adalah diklat yang merupakan syarat untuk memenuhi kompetensi PNS yang akan diangkat sebagai JFA atau untuk kenaikan jabatan dalam JFA. Diklat sertifikasi tersebut sampai dengan saat ini

hanya dilakukan oleh Pusdiklatwas BPKP karena merupakan kewenangan Instansi Pembina JFA.

**Salam Kompak
Edi Mulia**

Pertanyaan:

Yth Kepala Pusbin JFA di Jakarta
Assalamu'alaikum. Salam Hormat.

Saya mau bertanya mengenai standar kompetensi dan status auditor yang berasal dari program *inpassing*. Kebetulan saat ini saya sudah menjadi Auditor Muda melalui program *inpassing* (pada April 2017), saya juga sudah mendapat SK pengangkatan sebagai Auditor Muda. Yang menjadi pertanyaan, yaitu :

1. Apakah saya harus mengikuti diklat Auditor Muda lagi ?
2. Apakah dalam kegiatan pengawasan, misalnya audit, saya sudah bisa diperankan sebagai KetuaTim?
3. Ataukah saya, yang nota bene menjadi auditor nya lewat *inpassing*/ bukan lewat diklat penjenjangan Auditor Muda dan ujian sertifikasi auditor, untuk bisa diperankan sebagai ketua tim dalam pengawasan harus terlebih dahulu menempuh diklat dan ujian lagi, diklat dan ujian agar bisa diperankan sebagai ketua tim?
4. Begitupula untuk auditor yang *inpassing* langsung ke Auditor Madya, apakah saat dia lulus ujian *inpassing* jenjang madya, auditor bersangkutan dapat langsung diikutsertakan dan diperankan dalam tim pengawasan sebagai Pengendali Teknis?. Ataukah yang bersangkutan diharuskan terlebih dahulu menempuh diklat dan

ujian lagi agar bisa menjadi dalnis?.

5. Adakah perbedaan status kompetensi antara auditor yang berasal ("produk") dari diklat penjenjangan serta Ujian Sertifikasi Auditor (USA), dengan auditor yang berasal dari hasil program *inpassing* untuk jenjang auditor yang sama?. Misalnya antara Auditor Muda produk diklat penjenjangan, dengan Auditor Muda produk *inpassing*, adakah perbedaan status kompetensinya?

Mohon petunjuk yang jelas, berikut dasar hukumnya, agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai hal ini. Terimakasih. Wassalamu'alaikum. wr. Wb

**Hormat saya,
Ratnawulan dari Inspektorat
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat**

Jawaban

Kepada Saudari Ratnawulan di Inspektorat Kabupaten Garut

1. PNS yang telah lulus uji kompetensi *inpassing* Auditor Muda dan telah diangkat dalam JFA dengan jenjang jabatan Auditor Muda, tidak harus mengikuti Diklat Auditor Muda.
2. Auditor Muda yang diangkat melalui *inpassing*, dalam kegiatan pengawasan dapat diperankan sebagai Ketua Tim. Penentuan peran dalam penugasan sepenuhnya menjadi kewenangan pemberi tugas dengan mempertimbangkan kompetensi yang bersangkutan.
3. Auditor Muda yang diangkat melalui *inpassing*, tidak perlu mengikuti Diklat

penjenjangan Auditor Muda agar bisa diperankan sebagai Ketua Tim. Untuk itu, para Auditor Muda yang diangkat melalui *inpassing* disarankan mengikuti Diklat Teknis Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.

4. Auditor Madya yang diangkat melalui *inpassing*, tidak perlu mengikuti Diklat penjenjangan Auditor Madya agar bisa diperankan sebagai Ketua Tim. Untuk itu, para Auditor Madya yang diangkat melalui *inpassing* disarankan mengikuti Diklat Teknis Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan.
5. Kompetensi Auditor adalah kompetensi kumulatif. Artinya kompetensi Auditor Muda adalah kompetensi Auditor Pertama ditambah dengan kompetensi yang spesifik untuk jabatan Auditor Muda.

Salam Kompak
Edi Mulia

Pertanyaan

Pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bermaksud mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat pembentukan auditor, baik Ahli (1 kelas) maupun Terampil (2 kelas). Mohon agar Pusdiklatwas BPKP dapat memfasilitasi penyelenggaraan diklat tersebut, termasuk perkiraan jadwal pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan diklat. Kami mengusulkan diklat diselenggarakan mulai minggu keempat bulan Juli 2018 dan minggu keempat bulan September untuk dua kelas Terampil dan minggu pertama bulan Juli 2018 untuk diklat Ahli.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum, Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan, Kementerian

Keuangan

Jawaban:

1. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Pada dasarnya kami dapat memfasilitasi penyelenggaraan Diklat tersebut, dengan jadwal atau rencana seperti yang Saudara disampaikan. Diklat akan diselenggarakan di luar Pusdiklatwas BPKP, Ciawi, Bogor.
2. Biaya penyelenggaraan diklat sesuai dengan PP 20 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku Pada BPKP, adalah Rp5.750.000,00/peserta untuk Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan Rp6.730.000,00/peserta untuk Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Biaya tersebut adalah biaya penyelenggaraan diklat dan konsumsi sebesar Rp135.000/orang/hari, tidak termasuk biaya penginapan, tambahan konsumsi (apabila ada), transpor, dan uang harian peserta.
3. Data calon peserta agar di-input dalam aplikasi Registrasi Online BPKP pada alamat: <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/registrasi> dengan kode diklat nomor 2395 untuk Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan nomor 2594 untuk Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Data isian pada aplikasi tersebut beserta dokumen pendukungnya akan diverifikasi oleh Pusat Pembinaan JFA BPKP sebagai dasar penetapan calon peserta diklat.
4. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang P3JFA melalui telepon nomor (0251) 8249001-05 (sentral).



Profesi auditor intern pemerintah jaman *now* perlu senantiasa dibangun, dibina, dan dikembangkan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah. Diharapkan profesi auditor intern pemerintah mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Auditor intern pemerintah yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk lebih profesional dan berperan secara efektif sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah; serta Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam PP 60 tahun 2008 pasal 52 mengenai Kode Etik, dan pasal 53 mengenai Standar Audit, menyebutkan bahwa Kode Etik dan Standar Audit yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu dalam rangka melaksanakan mandat PP 60 tahun 2008, pada tanggal 30 November 2012 bertempat di Kantor BPKP Pusat, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, telah dibentuk Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), sebagai organisasi profesi yang mewadahi seluruh APIP Pusat maupun Daerah.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat AAIPI adalah organisasi profesi pengawasan intern di lingkungan pemerintah yang beranggotakan individu perorangan (Auditor termasuk P2UPD) dan unit kerja Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Unit kerja APIP merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan peme-

rintah non kementerian, Inspektorat/unit pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota dan Unit pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.



rintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral/ Inspektorat Utama/ Inspektorat/ Unit Pengawasan intern pada Kementerian/ Kementerian negara, Inspektorat utama/ Inspektorat Lembaga Peme-

Dengan terbentuknya AAIPI, maka forum bersama (Forbes) APIP pusat dan daerah serta organisasi APIP dengan nama lain meleburkan diri menjadi anggota AAIPI. Pengurus Forbes APIP di daerah menjadi pengurus AAIPI di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Visi AAPI adalah “Menjadi organisasi profesi terdepan dalam mendorong terwujudnya peran APIP yang profesional sebagai pemberi *assurance* dan *consulting* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah.” Untuk menjalankan visi tersebut, dibentuk Dewan Pengurus Nasional (DPN) AAPI yang dibantu empat Komite, yaitu Komite Kode Etik, Komite Pengembangan Profesi, Komite Standar Audit, dan Komite Telaah Sejawat

Kepengurusan DPN AAPI Tahun 2017 – 2018

Berdasarkan Keputusan Nomor KEP-008/AAPI/DPN/2017 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI), Susunan DPN AAPI sebagai berikut:

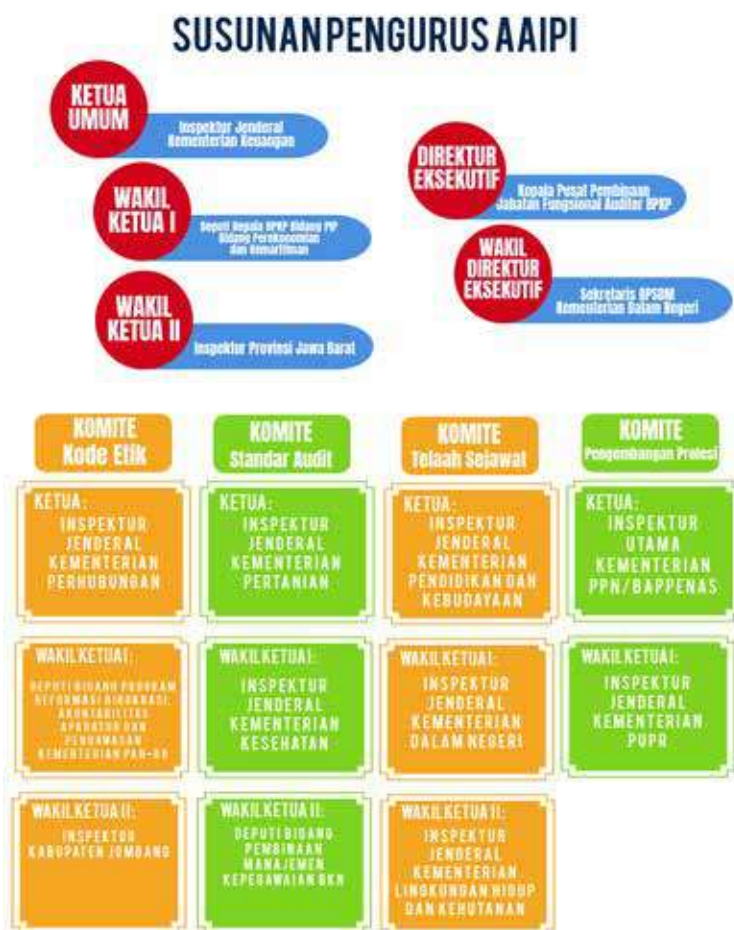
1. Ketua Umum:
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
2. Wakil Ketua I:
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Wakil Ketua II:
Inspektur Provinsi Jawa Barat

4. Direktur Eksekutif: Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
5. Wakil Direktur Eksekutif: Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri
6. Ketua: Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

7. Wakil Ketua I: Deputi Bidang Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB.
8. Wakil Ketua II: Inspektur Kabupaten Jombang.

Komite Standar Audit

1. Ketua :Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.





Workshop Saber Pungli tanggal 11-12 April 2017 di Palembang

- | | |
|---|--|
| <p>2. Wakil Ketua: Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.</p> <p>3. Wakil Ketua II: Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN.</p> | <p>Profesi</p> <p>5. Ketua: Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>6. Wakil Ketua I: Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> |
|---|--|

Komite Telaah Sejawat

- | | |
|--|---|
| <p>1. Ketua: Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>2. Wakil Ketua I: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>3. Wakil Ketua II: Inspektur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>4. Komite Pengembangan</p> | <p>Selama tahun 2017, DPN AAPI telah melaksanakan kegiatan untuk penguatan pengawasan pemerintah dan peningkatan kapabilitas auditor intern, antara lain Fasilitasi Pembentukan AAPI Wilayah dan Keanggotaan. Sampai dengan Tahun 2017, telah terbentuk 33 Dewan Pengurus Wilayah</p> |
|--|---|

(DPW) Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta tidak membentuk kepengurusan karena menginduk pada Dewan Pengurus Nasional. Jumlah anggota yang sudah mendaftarkan diri sebagai Anggota AAPI adalah 13.410 orang.

Sebagai wujud koordinasi antar DPN dan anggota, selama tahun 2017, AAPI telah melaksanakan Rapat Kerja Nasional AAPI, dan *Workshop* AAPI 2017 dengan tema “Peningkatan Kapabilitas Auditor AAPI Dalam Menghadapi Era Digital”, tanggal 13 September 2017 di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Komite Kode Etik telah menyelesaikan 1 pedoman dan 2 *draft*, yaitu Pedoman Pemantauan Penerapan Kode Etik AAPI, *Draft* Pedoman Perilaku Auditor Internal, dan *Draft* Keputusan Ketua Umum AAPI tentang Pemantauan Kode Etik AAPI.

Komite Pengembangan Profesi telah menyelenggarakan tiga kali *workshop*, dua kali *knowledge sharing session*, dan satu *draft* Rencana Strategis AAPI. *Workshop* Isu Aktual Internal Audit terdiri dari: *Workshop* Saber Pungli

tanggal 11-12 April 2017 di Palembang. *Workshop* Manajemen Risiko tanggal 17 Juli 2017 di Jakarta. *Workshop* Saber Pungli tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta.

Knowledge Sharing Session telah dilaksanakan dua kali dengan tema “Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)” pada tanggal 31 Januari 2017. Tema “Opini Laporan Keuangan dan Akselerasi Tindak Lanjut Audit BPK” pada tanggal 2 Juni 2017. Sedangkan *Draft* Rencana Strategis AAPI telah selesai disusun pada awal Februari 2018.

Komite Standar Audit telah melaksanakan kegiatan dengan *output* berupa Pengesahan Standar Profesi dan Standar Pemantauan. *Draft* Finalisasi Standar Audit Kinerja, Standar Audit dengan Tujuan Tertentu, Standar Jasa Konsultansi, dan *Framework* Pengembangan SAIPI, dan Penyusunan Standar Pengawasan.

Komite Telaah Sejawat telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2017, yaitu

Raker Komite Telaah Sejawat tanggal 15 Juni 2017 di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bimbingan Teknis Instrumen Telaah Sejawat tanggal 27 Juli 2017 di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Quality Assurance* Pengawasan Internal tanggal 20 September 2017 dan

19 Oktober 2017 di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kick Off Meeting* dengan Konsultan dalam rangka penyusunan *Online Learning System* tanggal 24 Oktober 2017 di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. FGD tanggal 11 Desember 2017 di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nara sumber Deputi BPKP Bidang Polhukam dan PMK, Irtama Bappenas, dan Inspektur VII Kementerian Keuangan.

Ada beberapa tantangan dan harapan capaian AAPI tahun 2018 antara lain. Penyelesaian Kontrak Kegiatan yang didanai Bank Dunia, seperti:

1. *Performance Audit Guidelines*
2. *Training of Trainers for*

IACM Assessor

3. *Training of Trainers for Quality Assurance Improvement Programme (QAIP)*
4. *Develop e-book and Printed books on good Practice in The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*
5. *Review PP 60 FY 2008 (Existing COSO Framework) in Indonesia*
6. *Independent Validation of BPKP IA-CM self Assessment and QAIP*
7. *Recipient Executed Trust Fund (RETF) Annual Audit*
8. *Development of AAPI Website*
9. *Membership database development*

Tantangan dan harapan AAPI di tahun 2018 yang lainnya antara lain Peningkatan Kapabilitas Auditor Intern melalui *Online Learning System*, seta Perumusan kegiatan dan pemberdayaan Dewan Pengurus Wilayah di Provinsi ■

(Diana/Agung Ragil)

Manusia secara kodrati berinteraksi. Komunikasi menjadi konsekuensi logis dari hubungan sosial. Sama dengan manusia, pemerintah juga berkomunikasi dan *Government Public Relation* (GPR) lah yang bertugas menjaga harmonisasi komunikasi antara pemerintah dan publik.



Mungkin sebagian besar pembaca setia Warta Pengawasan mengamini jika Penulis menyatakan bahwa *Public Relation* (PR) di negara-negara maju adalah profesi yang keren. Bagaimana dengan Indonesia? Pekerjaan GPR penuh tantangan, apalagi ketika demokrasi mulai mengemuka. Ketika demokrasi sudah diikuti oleh banyak negara, Amerika Serikat mensyaratkan demokrasi harus diikuti dengan transparansi dan partisipasi. Konsekuensinya, demokrasi diidentifikasi sebagai *open government*, hingga

akhirnya Indonesia pun masuk dalam *Open Government Partnership* (OGP).

Seperti virus, gelombang perubahan pada level global tersebut mau tidak mau menjangkit proses bisnis GPR. Implikasi di level lokal adalah adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akademisi Universitas Gadjah Mada Adam Wijoyo Sukarno ketika berbicara dalam *Focus Group Discussion* Penguatan Strategi Komunikasi Kehumasan BPKP di Yogyakarta (9/4) menyatakan bahwa saat ini publik semakin berkembang. GPR harus meng-

hadapi publik yang semakin dinamis, banyak, dan beragam. Terlebih lagi, GPR juga disodori gempuran inovasi teknologi yang efeknya hingga ke *level society*.

Organisasi harus beradaptasi. Lalu, Sudah Siapkah Kita sebagai GPR?

Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri, GPR masih dipandang sebelah mata. Menurut hasil penelitian *Ika Idris, GPR masih fokus pada divisinya sendiri, belum mampu membantu divisi lain dalam menganalisis dan mencari solusi masalah komunikasi. GPR juga hanya menjadi “jembatan”

pemerintah dengan pemangku kepentingan, belum menjadi fasilitator antara pemerintah dan publik.

GPR mau tidak mau harus mengubah strategi dan taktik komunikasi, menyesuaikan dengan era sekarang. Adam menyatakan bahwa GPR harus mengidentifikasi ulang fungsinya dalam organisasi. "Apakah GPR akan difungsikan untuk *creating mutually beneficial relationship*, *image making*, *maintaining relationship*, atau bahkan semuanya," ujar Adam.

Selanjutnya, GPR harus memetakan siapa *stakeholders* dan publiknya. "Siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan, GPR harus paham," lanjut Adam.

Menurut Adam, GPR tidak dapat serta merta mengantar informasi ke publik tanpa didahului dengan strategi komunikasi yang matang. "Langkah ketiga adalah menetapkan tujuan komunikasi, apakah hanya sekedar memberikan informasi atau sampai pada mengubah *behavior* publik. Setelah tujuan ditetapkan, barulah GPR bisa membuat konten yang sesuai dan menetapkan



Komunikasi adalah konsekuensi dari hubungan sosial

strategi *delivery*-nya melalui *platform* yang tepat. Jika langkah satu sampai tiga tidak dilakukan, komunikasi antara pemerintah dan publik tidak akan optimal," jelas Adam.

Dengan strategi komunikasi yang mantap, GPR diharapkan tidak hanya melulu membangun citra, tetapi juga menjadi fasilitator komunikasi sehingga terbangun relasi yang baik antara pemerintah dan publik. GPR harus menjadi

agen demokrasi, memastikan hak publik atas informasi dan hak publik untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah dapat terpenuhi.

"Peran Humas Pemerintah Di Era Keterbukaan Informasi (Analisis Isi Permenpan-RB No. 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya)" Jurnal Universitas Paramadina Vol 11 No 3, Desember 2014■

(ayu)



Akademi Universitas Gadjah Mada - Adam Wijoyo Sukarno



35 Tahun Ter Wujudkan Per Akunt





rus Berkarya, ngawasan untuk abilitas



Menjelang puncak perayaan HUT Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke-35 yang jatuh pada 30 Mei, rangkaian kegiatan digelar untuk memeriahkannya. Secara langsung, Pekan Olah Raga BPKP yang memperebutkan Piala Bergilir HUT BPKP tiap tahunnya itu dibuka Kepala BPKP Ardan Adiperdana dan seluruh pimpinan pada 16 Maret lalu. Tak menunggu lama, lomba *defile* dan yel-yel yang diikuti unit kerja BPKP Pusat dan sekitarnya seperti Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Pusdiklatwas menyemarakkan halaman kantor BPKP Pusat.

Masing-masing unit tampil tematik sesuai dengan tugas fungsinya dengan membawa kesan kekinian. Deputi Bidang Akuntan Negara misalnya yang tampil ala Dilan 1990 dalam mengenalkan produknya seperti Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Deputi PIP Perekonomian dan Kemaritiman mengangkat tema kebhinekaan Indonesia dengan kostum dari berbagai daerah di Indonesia dan Pusdiklatwas BPKP yang tampil ala kobo dan indian Amerika.

Tema HUT BPKP yang ke-35 kali ini yaitu "Inovasi Pengawasan untuk Akuntabilitas Pembangunan Negeri," dengan semakin banyak dan merata pembangunan di Indonesia ini, diharapkan muncul inovasi-inovasi di sektor pengawasan agar akuntabilitas senantiasa terwujud.

Juara *defile* dan yel-yel yakni Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang mengusung konsep *superhero Avengers* namun mampu tampil apik menyajikan produk unggulan seperti mengawal proyek *light rapid transportation* (LRT) dan *venue* Asian Games

2018.

Semangat olah raga memang sedang digaungkan ke seluruh pelosok negeri ini, karena tahun ini tahun olah raga, Indonesia menjadi tuan rumah akbar gelaran olah raga terbesar setelah olimpiade, Asian Games 2018.



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana(tengah) didampingi para deputi bersama-sama membunyikan sirine pertanda dimulainya porseni BPKP dalam rangka HUT ke - 35 BPKP



Defile kontingen dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta



Defile kontingen dari Sekretariat Utama



Defile kontingen dari Perwakilan BPKP Provinsi Banten

Meski masih akan digelar Agustus 2018, semangat olahraga sudah nampak dalam lomba-lomba olahraga yang diselenggarakan BPKP baik di perwakilan maupun di pusat. Di pusat, cabang olahraga (cabor) seperti voli, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, catur dan gable

dipertandingkan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Khusus untuk voli, bahkan dibagi menjadi kategori putra dan putri dengan Pusdiklatwas keluar sebagai pemenang kategori putra, dan Puslitbangwas BPKP sebagai juara putri.

Bulu tangkis yang di BPKP

telah mempunyai wadah BPKP *Badminton Club* (BPKP) akhirnya dimenangkan oleh Deputy Bidang Investigasi setelah di final mengalahkan Pusdiklatwas. Sementara tenis meja dan futsal keduanya dimenangkan oleh Sekretariat Utama. Tak hanya diisi cabor, lomba festival *band* juga



dihelat dengan bintang tamu finalis Indonesian Idol, Kunto Aji. Saat puncak perayaan HUT BPKP ke-35 BPKP, *family gathering*, diumumkan bahwa juara lomba *band* diraih grup band berasal dari tenaga harian lepas BPKP yang meraih poin tertinggi dari dewan juri.

Tidak hanya olah raga dan hiburan, riuh gempita gelaran HUT BPKP juga diisi berbagai kegiatan bhakti sosial seperti

donor darah, kunjungan ke makam pendiri BPKP Gandhi di taman makam pahlawan (TMP) Kalibata dan makam Almarhum Kepala BPKP Arie Soelendro di Tanah Kusir, kediaman beberapa purna bhakti BPKP, pemberian santunan ke panti asuhan, serta pemberian santunan kepada anak-anak tenaga harian lepas (THL) BPKP yang berprestasi. Tema HUT

BPKP yang ke-35 kali ini yaitu “Inovasi Pengawasan untuk Akuntabilitas Pembangunan Negeri,” dengan semakin banyak dan merata pembangunan di Indonesia ini, diharapkan muncul inovasi-inovasi di sektor pengawasan agar akuntabilitas senantiasa terwujud.

Sebagaimana tema HUT, lomba inovasi untuk pihak internal dan eksternal juga

“Inovasi Pengawasan untuk Akuntabilitas Pembangunan Negeri,” dengan semakin banyak dan merata pembangunan di Indonesia ini, diharapkan muncul inovasi-inovasi di sektor pengawasan agar akuntabilitas senantiasa terwujud



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana mengibarkan bendera start tanda dimulainya jalan santai family gathering BPKP



Penampilan grup band dari Tenaga Harian Lepas BPKP



Penampilan grup band dari Deputi PPKD



Penampilan grup band dari Deputi Polhukam dan PMK

ditawarkan. Untuk pihak eksternal terdapat lomba inovasi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan inovasi peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan untuk pihak internal BPKP

selain dua lomba di tersebut juga diadakan lomba penulisan makalah mengenai manajemen risiko sektor pemerintahan, video and *writing competition* "My SK My Adventure", foto, infografis, video/videografis, dan penulisan berita di laman

BPKP. Semoga dengan bertambahnya usia BPKP, pengawasan akan terus berinovasi, berkembang dan tumbuh dewasa mengikuti pembangunan di semua sektor yang tak kalah cepat, agar akuntabilitas senantiasa terwujud■



Kepala BPKP - Ardan Adiperdana beserta ibu Retno melakukan kunjungan ke makam pendiri BPKP Gandhi di taman makam pahlawan (TMP) Kalibata didampingi Istri Almarhum Gandhi.



Sekretaris Utama - Dadang Kurnia, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Gatot Darmasto, serta Ibu KBI DW BPKP melakukan kunjungan ke makam Almarhum Kepala BPKP - Arie Soelendro di taman makam Tanah Kusir didampingi Istri Almarhum Arie Soelendro.



Sekretaris Utama Periode 2013 - 2017 - Meidyah Indreswari

Kiprah Perempuan dalam Pengawasan

Pilihan hidup setiap orang mungkin berbeda, tetapi bagaimana menyikapi pilihan tersebut dengan penuh makna baik bagi dirinya sendiri, terutama untuk orang lain itulah yang terpenting. Mungkin di awal perjalanan karir, tidak terlintas sedikitpun di benak tokoh-tokoh yang representatif mewakili kiprah perempuan-perempuan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam ulasan kali ini.

Di era sekarang, banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam lembaga pemerintahan seperti BPKP, artinya era pergeseran makna emansipasi lebih luas dari sekedar memperjuangkan hak-hak perempuan. Tanpa melupakan kodrat, bukti perjuangan Kartini tetap bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang bermanfaat oleh para wanita karier ini untuk institusinya, bahkan tak sedikit yang harus menanggung risiko tinggi.

Jangan Buat Standar Rata-Rata, Tetapkan yang Terbaik

Siapa yang tak rindu sosok Meidyah Indreswari? Wanita yang akrab disapa lin ini tidak lain adalah Sekretaris Utama wanita pertama pada periode 2013 - 2017 di BPKP. Dalam wawancaranya dengan Warta Pengawasan, lin menyatakan bahwa ihwal dirinya memilih berkarir sebagai auditor pada BPKP adalah pilihan yang tepat dalam hidupnya. Alasan utama lin menjadi pegawai negeri sipil (PNS), menurut dia setiap kerja keras yang ia lakukan adalah untuk kepentingan negara. "Dengan begitu saya mempunyai banyak kesempatan untuk memberikan pemikiran dan tenaga bagi lingkup yang lebih luas", ujar lin.

Peraih doktor dari *Massey University New Zealand* ini ingin agar CPNS yang baru saja diterima selalu menanamkan dalam pikirannya hal tersebut jika memilih bekerja menjadi PNS. "Itulah yang mendasari kebanggaan seorang PNS kelak. Tak kalah penting, jangan mudah puas, terus belajar, dan biasakan diskusi," pesannya. lin berharap BPKP semakin meningkat perannya

dalam pemerintahan sekarang dan mendatang baik dalam peran *consulting* maupun *assurance*.

Sebagai auditor pemerintah, BPKP saat ini menurutnya sudah dalam peran yang tepat dan telah mampu melaksanakan tugas sebagai *trusted advisor* dengan diikutsertakannya dalam rapat kabinet dan rapat terbatas dengan presiden. Presiden, sebagai pengambil keputusan harus didukung oleh penyediaan informasi yang akurat dan cepat, maka dari itu BPKP turut diajak di dalamnya.

Sesuai visi BPKP untuk menjadi auditor internal RI berkelas dunia, BPKP diyakini harus mampu mengelola *big data* dan mulai membangun kompetensi para auditornya dari sekarang. Hal tersebut menurut lin yang pernah aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi dan yayasan pendidikan ini, data audit akan semakin rumit. "*Average is not option, we should always try to reach the best*. Jangan buat standar rata-rata, tetapi buat standar yang terbaik," kata lin.

Kiprah lin yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas), dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI II tersebut menurutnya tidak serta merta dan selamanya berjalan mulus. lin percaya jika dimanapun ditempatkan, selalu ada pelajaran atau hikmah seseorang ditempatkan di tempat tersebut, meskipun kadang tidak sesuai keinginan. "Saya ingat dulu beasiswa saya dapat karena saya pernah ditempatkan di bagian kepegawaian dan di bidang perencanaan. Padahal saat itu saya kepingin jadi auditor yang mengaudit," ujar lin sembari tersenyum.

Perempuan kelahiran Bandung itu mengatakan, sebagai pemimpin harus meninggalkan warisan yang bermanfaat. Sistem penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor dan pengukuran *good corporate governance* (GCG) merupakan bukti kinerja lin saat menjabat di unit terkait. "Jangan lupa dalam memahami suatu konsep, harus dapat menjelaskan secara simpel, agar mudah dimengerti" tutup wanita yang

bercita-cita memiliki lembaga pendidikan dan menulis beberapa buku ini.

Siap dengan Konsekuensi Peran Ganda

Mengemban amanah sebagai ibu sekaligus auditor yang sudah berkiprah selama 34 tahun pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menjadi tantangan tersendiri bagi Riyani Budiastuti. Menurut direktur pada Deputi Akuntan Negara periode 2015 - 2018 dengan dua anak ini, tugas seorang ibu tidak bisa ditinggalkan. Pun begitu, tidak boleh menjadikannya hambatan dalam menjalankan tuntutan pekerjaan. Saat seorang wanita memutuskan untuk tetap berkarir setelah memiliki anak, mau tidak mau harus siap dengan konsekuensi kedua peran tersebut.

Mengutip Albert Einstein, *"Life is like riding a bicycle. To keep balance, you need to keep moving."* Kurang lebih begitulah Riyani dalam menyeimbangkan kedua perannya. Kepada tim Warta Pengawasan, ia pun berbagi mengenai suka duka sebagai *working mom* di BPKP. Menurutnya, hal yang dapat dilakukan seorang

pegawai saat menghadapi kondisi dilematis adalah dengan memberikan *win-win solution*. "Yang penting adalah pekerjaan terselesaikan. Tetap jalankan tugas, berikan usulan solusi kepada pimpinan", ujar Riyani. Ketika itu, sambil mengingat kembali masa-masa ia mengandung dan mengurus balita, diakuinya memang tak mudah. Namun, kondisi tersebut berhasil ia lewati tanpa ada yang harus ia tinggalkan. Kerangka pembagian tugas dan dukungan dalam tim menjadi hal yang sangat penting di saat seperti itu.

Wanita lulusan Universitas Indonesia ini mengutarakan bahwa pengalamannya bertugas di Deputi Bidang Pengawasan Khusus menjadi salah satu yang sangat berkesan. "Saat itu kita diminta untuk membuktikan suatu aduan. Nah untuk membuktikannya, kita diberikan tugas untuk menyusup di tim audit operasional supaya tidak terlihat sedang melakukan audit khusus", kenang Riyani. Tantangan yang tidak biasa dalam menjalankan tugas membuat Riyani selalu mengingat penugasan yang sempat membuatnya cemas tersebut,

namun berhasil dilewati dan memberikan kepuasan tersendiri baginya. Bahkan keberhasilannya mencapai jenjang karir menjadi Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur pun sebelumnya tidak pernah terpikir olehnya ketika dulu pertama kali menginjakkan kaki di BPKP.

Berbicara mengenai inovasi pengawasan, Riyani berpesan agar para auditor BPKP lebih *passionate* dalam menjalankan tugas. "Contoh kecil saat melakukan asesmen GCG, saya sering minta agar jangan semata-mata terpaku pada format baku. Lihat ada *current issue* gak di luaran sana? Ada gak kasus yang sekiranya menjadi pembuktian bahwa tata kelolanya sudah baik atau belum? Lalu, tata kelola apa yang masih lemah? Kalau hanya mengacu pada dokumen, asesi pasti menyediakan yang baik-baik saja. Jadi, mau gak mau harus lebih detil untuk pembuktian tata kelola atas *current issue*", tegasnya.

Menurut Riyani, auditor harus mengupayakan *data-base* kondisi perusahaan dan menggunakan insting dalam mencari kemungkinan adanya

kecurangan (*fraud*). Di samping itu, bisa juga bekerja sama dengan kedeputian lain, seperti Deputy Bidang Investigasi, untuk mendapatkan data. Setiap hasil penugasan sedapat mungkin harus menghasilkan masukan bagi pembuat kebijakan. Setidaknya hal tersebut membantu kita untuk membiasakan diri berpikir secara makro.

Menjelang masa purnabaktinya, Riyani berharap agar BPKP ke depan dapat semakin menunjukkan posisi strategisnya, seperti memberikan *second opinion* bagi program-program pemerintah dalam rapat-rapat terbatas. "Saya merasa BPKP sekarang sangat dibutuhkan oleh Presiden. Harapannya ke depan, BPKP semakin seperti itu karena lingkup kita berbeda dengan APIP lainnya, yaitu Indonesia. Saya harap BPKP selalu dibutuhkan untuk memberi masukan", tutup wanita kelahiran Jakarta ini.

Kerja Keras dan Cerdas serta Dukungan Keluarga Merupakan Kunci Keberhasilan

Berkecimpung di dunia investigasi selama 20 tahun, melakukan audit investigatif banyak kasus merupakan pengalaman sehari-hari bagi Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BPKP, Agustina Arumsari. Siapa sangka, salah satu Srikandi BPKP ini telah berkontribusi besar dalam mengungkap kasus-kasus yang merugikan negara miliaran rupiah, seperti kasus pengadaan *Uninterruptible Power Supply* (UPS), pengadaan *Roll Out Customer Information System*-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS RISI) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan beberapa kasus lain di BUMN.

Sari, begitu sapaan akrabnya, adalah perempuan



dok: Humas BPKP

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur pada Deputy Deputy Akuntan Negara periode 2015-2018 - Riyani Budiastuti



masa kini yang cerdas dan enerjik. Saat ditemui Tim Warta Pengawasan, Sari banyak bercerita tentang kepuasan yang dia rasakan ketika berhasil mengantarkan sebuah kasus ke meja hijau. Menurutnya, bekerja di bidang investigasi, semuanya berkesan. “Bukan karena senang melihat seseorang di penjara, namun seperti permainan *puzzle*, kita tertantang mengetahui bentuk sebenarnya *puzzle* tersebut dan ada pengembalian uang negara. Namun, salah satu pengalaman tak terlupakan adalah saya pernah melaksanakan audit investigatif dalam sebuah tim yang anggotanya perempuan semua, mulai dari anggota tim hingga pengendali teknisnya, yang berangkat dari nol,” kata Sari.

Berangkat dari nol artinya kasus tersebut dikembangkan dari pengaduan masyarakat, lalu audit investigatif dilakukan sendiri tanpa bantuan penyidik, kemudian laporan audit investigatif diserahkan ke aparat penegak hukum, dan berhasil disidangkan ke meja hijau. “Itu sangat berkesan, mirip dengan kasus pengadaan UPS saat di Perwakilan DKI Jakarta. Ketua tim, dalnis dan kabinnya perempuan. Hal itu adalah bukti, perempuan juga mampu jika mau,” cerita Sari.

Sari adalah seorang istri dan ibu, yang juga harus mendidik anak-anaknya, maka kerja keras dan cerdas menjadi kunci suksesnya. “Cerdas itu luas sekali termasuk cerdas mengelola waktu, mengelola uang termasuk mengelola emosi,” ujarnya berseloroh dan

Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BPKP - Agustina Arumsari

dok: Humas BPKP

tertawa lepas. “Ibu yang berkarier tidak bisa seperti bapak-bapak yang pulang kantor masih bisa *kongkow* di warung kopi atau nonton TV di rumah, cerdas mengelola uang karena banyak yang tidak mau di bidang investigasi dengan alasan kurang penghasilan, mengelola emosi termasuk emosi berbelanja, ke salon atau *kongkow* dengan teman” cerita Sari.

Salah satu bentuk kerja cerdas adalah gagasannya untuk membangun Laboratorium Komputer Forensik BPKP di tahun 2012. “Dengan bekal pelatihan komputer forensik gratis dari tim Pak Iswan Elmi semasa beliau di KPK, bersama-sama Pak Gatot Darmasto (Direktur Investigasi BUMN dan BUMD waktu itu), Pak Eddy Mulyadi sebagai Deputy Investigasi, laboratorium ini terwujud,” lanjutnya.

Laboratorium komputer forensik sangat membantu analisa bukti elektronik, audit menjadi lebih efisien bahkan lab ini menjadi andalan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI saat penyidikan kasus UPS. Dari gagasannya ini, Kepala BPKP saat itu Mardiasmo memberi

penghargaan sebagai Inisiator Laboratorium Komputer Forensik pada tahun 2012. “Dari sisi kompetensi tidak ada yang berbeda dari laki-laki dan perempuan, sepanjang memiliki kemauan untuk bekerja keras. Saya bersyukur BPKP memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk berkarya,” ungkap Sari yang saat ini merupakan eselon dua termuda di BPKP.

Sari mengaku di balik kesuksesan kariernya, dukungan keluarga sangat berarti. “Untuk kasus-kasus dengan risiko-risiko tertentu misalnya, terkadang suami mendampingi sidang,” kata Sari. Dukungan-dukungan seperti ini yang menguatkan Sari hingga saat ini menjadi sosok perempuan yang pemikiran-pemikirannya berpengaruh untuk BPKP khususnya bidang investigasi.

Ketika ditanya mengenai harapan Sari untuk BPKP di usia BPKP yang kini menginjak 35 tahun, Sari bercerita sambil mengajak kami berkunjung ke Laboratorium Komputer Forensik BPKP. “Inovasi teknologi informasi sangat penting. Terlebih lagi, sekarang adalah era *big data*.

Hampir semua institusi punya *big data*, contohnya data kependudukan, data UMKM, data sisminbakum, data paspor sampai ke data penumpang pesawat, penumpang kereta api bahkan konten medsos. BPKP harus bisa mengakses dan mengelola data tersebut menjadi informasi yang mendukung pengawasan yang dilakukan BPKP. Kalau kita bisa mengelola data tersebut sendiri, tentunya ini akan menghemat waktu dan tenaga ketika mengaudit. Teknologi informasi tidak boleh ketinggalan, walaupun nilai investasinya cukup besar,” tutup Sari.

Potret perjuangan beberapa perempuan dalam lingkup pengawasan tersebut menunjukkan apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan selama berkiprah. Apapun penilaian orang, perempuan-perempuan sekarang lebih maju dibanding sebelumnya. Gambaran tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dapat berkiprah dalam sektor apa pun di mana pun, selama potensi yang ada dalam dirinya dimanfaatkan dan terus dikembangkan secara baik serta maksimal ■

(nadia/ais/dony)



dok: Humas BPKP

Kepala Biro Hukum dan Humas - Syaifudin Tagamal

Perkuat Strategi Komunikasi, Perkuat Kinerja Organisasi

Kondisi organisasi yang bergerak dinamis sesuai tuntutan perubahan baik kebijakan presiden serta kementerian/lembaga/pemda selaku *stakeholders* BPKP, masyarakat luas maupun perkembangan dunia secara makro harus disikapi dengan responsif oleh semua unsur organisasi. Tak terkecuali bagi Biro Hukum dan Humas BPKP khususnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan komunikasi publik

Setiap demi setiap, kini kehumasan BPKP semakin memperkokoh perannya, inovasi yang terbaru adalah program Penguatan Strategi Komunikasi BPKP dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik (STRIKE)

“Di bidang kehumasan, BPKP telah melakukan pengelolaan media sosial secara aktif menindaklanjuti kebijakan presiden yang mewajibkan seluruh K/L/P mengelola media

sosial dengan proporsi konten 1/3 konten intern, 1/3 K/L lain dan 1/3 konten presiden”, ujar Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia. “Namun, ke depan strategi komunikasi juga harus diperkuat, selain untuk memperkuat peran kehumasan BPKP juga untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi khususnya dalam memenuhi target Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019”, ungkap Dadang lebih lanjut.



dok: Humas BPKP

Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia.

....ke depan strategi komunikasi juga harus diperkuat, selain untuk memperkuat peran kehumasan BPKP juga untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi khususnya dalam memenuhi target Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019...

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP, Syaifudin Tagamal menegaskan bahwa, "Evaluasi dan Rencana Aksi Satgas SPIP merekomendasikan perlunya strategi komunikasi untuk akselerasi peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP mengingat sampai dengan akhir tahun 2017 pencapaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 K/L/P rata-rata masih di bawah 50%. Selain itu, Audit Komunikasi BPKP Tahun 2017 salah satunya juga merekomendasikan perlunya Strategi Komunikasi untuk menyukseskan program kerja BPKP".

Strategi Komunikasi perlu dimiliki untuk menata komunikasi baik secara internal dengan membangun sinergitas maupun eksternal dengan para *stakeholder* agar memiliki kesadaran yang sama atas pesan yang disampaikan dalam rangka membangun tata

kelola pemerintahan yang lebih baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, secara internal menunjukkan masih kurang optimalnya internalisasi dan kurangnya pemahaman teknis, substansi, dan strategi komunikasi dari komunikator. Di sisi lain, secara eksternal masih terdapat resistensi dari pimpinan K/L/Pemda dan masih terdapat anggapan SPIP belum mampu mencegah korupsi.

Dengan implementasi strategi komunikasi secara menyeluruh diharapkan program kerja BPKP dapat tersosialisasi, dipahami dan dilaksanakan oleh stakeholder untuk mendukung program peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*)■

(dian)



Presiden Ri - Joko Widodo

dok: Humas President Lecturer

Menuju Birokrasi Berkelas Dunia

"Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat yang tangguh, kerja keras, selalu berinovasi dan menaruh kepentingan rakyat dan bangsa diatas kepentingan yang lain".

Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo pada acara *Presidential Lecture* yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2018 di Istora Senayan Jakarta.

Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta membuka perspektif Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar memahami tantangan tugas di era industri 4.0, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama lintas kementerian/lembaga menyelenggarakan acara *Presidential Lecture* bagi CPNS.

Selain diisi oleh pembekalan dari presiden, acara yang bertajuk 'Bersatu Dalam Harmoni: Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024' tersebut, juga diperkaya oleh sesi *inspiring lecture* dari

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, CEO Gojek Nadiem Makarim, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief. Hadir pula pada acara tersebut Deputi Kepala Bidang Polhukam dan PMK BPKP Ernadhi Sudarmanto mewakili Kepala BPKP.

"Pembekalan langsung dari Bapak Presiden sangat berarti bagi para CPNS. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak birokrasi dan tulang punggung bangsa menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024," jelas Menteri PANRB Asman Abnur saat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Asman Abnur menyampaikan bahwa formasi CPNS yang dibuka pada tahun 2017 sejumlah 37.138 di 62 kementerian/lembaga dan 1 provinsi dengan total pelamar mencapai 2,4 juta lebih. Artinya seluruh CPNS yang lolos seleksi ini adalah putra/putri bangsa terbaik dari yang terbaik. "Dari jumlah formasi tersebut, 34.167 adalah formasi umum, 2.310 formasi lulusan *cumlaude*, 168 formasi penyandang disabilitas, serta 493 formasi putra/putri Papua dan Papua Barat



Menteri Keuangan RI - Sri Mulyani

dok: Humas BPKP



Menteri PAN dan RB - Asman Abnur

yang akan ditempatkan di lintas kementerian/lembaga," jelasnya.

Jokowi pada paparannya menyampaikan bahwa perubahan yang terjadi berjalan

dengan sangat cepat saat ini, sehingga pemerintah dituntut untuk bekerja lebih cepat, responsif dan efisien begitu pula para birokrat.

"Masyarakat ingin dilayani

dengan cepat jadi pekerjaan yang cepat jangan ditunda untuk dilaksanakan," tegasnya. Ia juga berpesan kepada para CPNS agar selalu memiliki rasa ingin tahu dan bekerja dengan inovasi jangan hanya fokus pada rutinitas saja.

Acara dimeriahkan dengan permainan angklung yang melibatkan sebanyak 5165 ASN, hal ini menjadi rekor tidak hanya di Indonesia, namun menjadi rekor dunia, mengingat baru pertama kalinya di dunia angklung dimainkan secara bersama-sama dengan jumlah peserta mencapai 5165 peserta■

(suryo)



permainan angklung yang melibatkan sebanyak 5165 ASN

dok: Humas Presiden Lecturer



Keterangan Foto:

1. Perwakilan BPKP Prov Aceh
2. Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Utara
3. Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Barat
4. Perwakilan BPKP Prov Riau
5. Perwakilan BPKP Prov. Jambi
6. Perwakilan BPKP Prov. Bengkulu
7. Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Selatan
8. Perwakilan BPKP Prov Lampung
9. Perwakilan BPKP Prov. Bangka Belitung
10. Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Riau
11. Perwakilan BPKP Prov. Banten
12. Perwakilan BPKP Prov. DKI Jakarta
13. Kantor BPKP Pusat
14. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Barat
15. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Tengah
16. Perwakilan BPKP Prov. Jawa Timur
17. Perwakilan BPKP Prov. DI Yogyakarta
18. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Barat
19. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah
20. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur

21. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan
22. Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Utara
23. Perwakilan BPKP Prov. Bali
24. Perwakilan BPKP Prov. NTB
25. Perwakilan BPKP Prov. NTT
26. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tengah
27. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan
28. Perwakilan BPKP Prov Sulawesi Barat
28. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara
29. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Selatan
30. Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Utara
31. Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo
32. Perwakilan BPKP Prov. Maluku
33. Perwakilan BPKP Prov. Maluku Utara
34. Perwakilan BPKP Prov. Papua
35. Perwakilan BPKP Prov. Papua Barat
36. Pusdiklatwas BPKP





Foto dok: Asiangames

BPKP
Kawal
Akuntabilitas
Penyelenggaraan



ASIAN GAMES 2018

Jakarta-Palembang